RESOLUSI KONFLIK LOKAL DI TAPANULI

Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.
Drs. H. Samsuddin Pulungan, M.Ag.
Ahmatnijar, M.Ag.

KENCANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

RESOLUSI KONFLIK LOKAL DI TAPANULI

IAIN Padangsidimpuan

IAIN Padangsidimpuan

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang·Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang·Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,· (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,· (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,· (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,· (empat miliar rupiah).

RESOLUSI KONFLIK LOKAL DI TAPANULI

Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.
Drs. H. Samsuddin Pulungan, M.Ag.
Ahmatnijar, M.Ag.

IAIN Padangsidimpuan

RESOLUSI KONFLIK LOKAL DI TAPANULI
Edisi Pertama
Copyright © 2020

ISBN 978-623-218-579-1
14 x 20,5 cm
viii, 98 hlm
Cetakan ke-1, Agustus 2020

Kencana. 2020.1284

Penulis
Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.
Drs. H. Samsuddin Pulungan, M.Ag.
Ahmatnijar, M.Ag.

Desain Sampul
Irfan Fahmi

Penata Letak
Y. Rendy & Miya

Penerbit
KENCANA
Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun · Jakarta 13220
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP
e-mail: pmg@prenadamedia.com
www.prenadamedia.com
INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

IAIN Padangsidimpuan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan tulus kami sampaikan ke hadirat Allah Swt. yang telah berkenan memberikan banyak nikmat, hidayah, serta kemampuan sehingga buku dari hasil penelitian yang berjudul "Resolusi Konflik di Tapanuli" yang berasal dari judul penelitian "Mengelola Konflik, Membangun Damai: Studi Resolusi Konflik Lokal di Tapanuli." dapat diselesaikan sesuai jadwal. Selawat salam sejahtera buat Rasulullah saw. sebagai pembawa risalah suci, Islam.

Penerbitan buku ini didanai melalui dana DIPA BOPTN IAIN Padangsidimpuan tahun 2019. Hasil penelitian lapangan ini memberikan banyak manfaat, pengalaman, dan peluasan wawasan terutama bagi para penulis, oleh karenanya perlu kiranya menjadi sebuah bahan bacaan dalam bentuk buku.

Disadari bahwa penelitian ini melibatkan banyak pihak yang memberikan dukungan dan kontribusi positifnya, sehingga ungkapan rasa terima kasih kepada para kontributor untuk penyelesaian laporan penelitian ini, hingga bisa dicetak menjadi sebuah buku yang akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih disampaikan kepada banyak pihak, utamanya kepada Bapak Rektor IAIN Padangsidimpuan, Ketua LPPM beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk meneliti serta memberikan kontribusi besar dalam penulisan buku hasil penelitian ini. Terima kasih yang sama kami sampaikan kepada para

IAIN Padangsidimpuan

kepala desa, lurah, informan baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Ketua MUI di Kota Padangsidimpuan, Sibolga, Tapanuli Tengah, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, narasumber dan peserta FGD yang telah bersumbangsih dalam terselesaikannya buku ini.

Pada akhirnya, kami sadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan dari banyak aspek termasuk aspek ilmiahnya, untuk itu saran dan kontribusi konstruktif tetap diharapkan adanya. Semoga buku ini memberikan banyak manfaat. Terima kasih.

Padangsidimpuan, 14 November 2019
Penulis Utama

dto.

Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.

IAIN Padangsidimpuan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 10
E. Manfaat Penelitian 10

BAB 2 LANDASAN TEORI 11
A. Kajian Teori 11
B. Penelitian Terdahulu 55
C. Kerangka Berpikir 56

BAB 3 METODE PENELITIAN 57
A. Jenis Penelitian 57
B. Waktu dan Tempat Penelitian 58
C. Subjek Penelitian 58
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 59
E. Teknik Analisis Data 59

IAIN Padangsidimpuan

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 61
A. Hasil Penelitian....61
B. Pembahasan....74

BAB 5 PENUTUP 81
A. Simpulan....81
B. Saran....82

DAFTAR PUSTAKA 83
PARA PENULIS 91

IAIN Padangsidimpuan

BAB 1

PENDAHULUAN

IAIN Pandangsidimpuan

A. LATAR BELAKANG

Indonesia negara keragaman. Populasi masyarakat yang berbeda-beda bersatu dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika.* Perbedaan suku, agama, ras, dan golongan menjadi kekuatan positif dalam membangun peradaban bangsa. Namun di sisi lain, keberagaman penduduk Indonesia dapat memunculkan berbagai konflik di masyarakat. Beberapa aksi kekerasan dan terorisme di Tanah Air menjadi catatan kelam.[1] Tragedi peledakan bom

[1] Terjadi ledakan bom di Gereja Santa Anna dan HKBP Kawasan Kalimalang Jatiwaringin, Jakarta Timur pada tahun 2001 tanggal 22 Juli 2001, korban lima orang tewas. Bom Plaza Atrium Senen Jakarta tanggal 23 September 2001. Bom restoran KFC, Makassar, 12 Oktober 2002. Bom di halaman sekolah Australian International School (AIS), Pejaten, Jakarta pada tanggal 6 November 200. Kemudian terjadi ledakan bom tahun baru, granat manggis meledak di depan Rumah Makan Ayam Bulungan, Jakarta. Satu orang tewas dan seorang lainnya luka-luka. Kejadian tersebut terjadi di tahun 2002, 1 Januari 2002. Telah terjadi ledakan bom sebanyak empat kali di berbagai gereja di Palu, Sulawesi Tengah. Tidak ada korban jiwa. Bom Bali, 12 Oktober 2002. Tahun 2003 bom rakitan meledak di Lobi Wisma Bhayangkari, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, 3 Februari 2003. Bom JW Marriott, 5 Agustus 2003. 10 Januari 2004 terjadi ledakan bom di Palopo yang menewaskan empat orang. Bom Kedubes Australia, 9 September 2004. Tahun 2005 Bom Pamulang, Tangerang, 8 Juni 2005. Bom meledak di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M. Iqbal di Pamulang Barat. Bom Bali, 1 Oktober 2005. Tahun 2009 terjadi dua ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta. Ledakan terjadi hampir bersamaan, 17 Juli 2009 sekitar pukul 07.50 WIB. Tahun 2011 bom Cirebon, 15

di Tanah Air belakangan ini banyak dilakukan oleh sekelompok masyarakat penganut paham radikal, kaum fundamentalis, kelompok garis keras yang memahami ajaran agama secara sempit.

Kata radikalisme dan pluralisme adalah dua paradigma yang memiliki perbedaan dan memiliki makna penerimaan yang saling bertolak belakang dalam kehidupan masyarakat. Radikalisme dan pluralisme disebut sebagai *opposition binner*, selain pada bidang sosial, politik, budaya, dan ekonomi merupakan aspek yang cukup sukar untuk dipisahkan di dalam proses kehidupan umat beragama. Di satu sisi, pandangan terhadap makna kata radikalisme adalah bersifat eksklusif dengan paham menganggap orang lain tidak ada, tertutup, rigid, ekstremisme, dan terkadang bersifat militeristik. Adapun pandangan terhadap makna kata pluralisme

---

April 2011. Ledakan bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon saat Shalat Jumat yang menewaskan pelaku dan melukai 25 orang. Bom bunuh diri terjadi di Solo pada tanggal 25 September 2011. Satu orang pelaku bom bunuh diri tewas dan 28 lainnya terluka. Tahun 2012 Bom Solo, 19 Agustus 2012. Granat meledak di Pospam Gladak, Solo, Jawa Tengah. Ledakan ini mengakibatkan kerusakan kursi di Pospam Gladak. Tahun 2013 Bom Polres Poso 2013, 9 Juni 2013 dengan target personel polisi yang sedang apel pagi. Bom meledak di depan Masjid Mapolres Poso, Sulawesi Tengah. Pada tahun 2016 telah terjadi baku tembak di Jakarta, 14 Januari 2016. Ledakan dan baku tembak terjadi di sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2016, ledakan bom bunuh diri terjadi di halaman Markas Kepolisian Resor Kota Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah. Korbannya adalah satu pelaku tewas dan satu petugas kepolisian mengalami luka. Pada 28 Agustus 2016, ledakan bom bunuh diri telah terjadi di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Jl. Dr. Mansur, Kota Medan, Sumatra Utara. Pelaku mengalami luka bakar, sedangkan seorang pastor mengalami luka ringan. Pada tanggal 13 November 2016, sebuah bom molotov meledak di depan Gereja Oikumene Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Terjadi sebuah ledakan bom molotov di Vihara Budi Dharma, Kota Singkawang, Kalimantan Barat pada tanggal 14 November 2016. Sebuah Bom Panci meledak di Kampung Melayu, Jakarta Timur pada tanggal 24 Mei 2017. Pada 8 Mei 2018, Penyanderaan sejumlah anggota brimob dan densus 88 selama 36 jam oleh 156 Napi Terorisme di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Dilaporkan, lima perwira Polri gugur dan satu napi teroris tewas, sedangkan empat perwira Polri luka berat/ringan. Bom di Surabaya terjadi 13-14 Mei 2018. Sedikitnya lima belas orang tewas dan puluhan lainnya terluka menjadi korban setelah serangkaian pengeboman bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur. Pada malam harinya, sebuah bom meledak di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo, Jawa Timur. Keesokan harinya, sebuah bom meledak di Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur, pada 14 Mei 2018, pukul 08.50 WIB. Semua pelaku yang melakukan rentetan teror bom di Surabaya dan Sidoarjo ini merupakan anggota dari jaringan Jemaah Ansharut Daulah (JAD), yang berafiliasi dengan negara Islam Irak dan Syam (ISIS). Pada 16 Mei 2018, Mapolda Riau diserang oleh kelompok teroris Jemaah Ansharut Daulah (JAD). Setidaknya, satu orang polisi gugur, dua orang polisi dan jurnalis mengalami luka. Empat orang teroris tewas tertembak, sedangkan satu orang teroris yang berperan sebagai pengemudi mobil melarikan diri.

IAIN Padangsidimpuan

mengedepankan pada nilai di dalam kehidupan masyarakat, sikap keterbukaan, dan inklusif.[2]

Sikap radikal atau fundamentalis tidak terlepas dari pemahaman keagamaan. Tindakan radikalisme tidak hanya dikaitkan kepada penganut agama Islam, tetapi juga penganut agama lain. Fenomena radikalisme hampir terjadi pada semua agama. Kekerasan agama Hindu dapat dilihat dalam kasus kekerasan agama di India Selatan, yaitu antara kaum Sikh haluan keras dan Islam. Kekerasan agama antara kaum Yahudi Ultra dan umat Islam dijumpai di Israel. Di Jepang juga ditemukan kekerasan agama Shinto yang mencederai agama lainnya. Demikian pula di agama Kristen seperti halnya yang terjadi di Amerika Serikat dan juga belahan Eropa.[3]

Radikalisme atau tindakan kekerasan dapat dilihat dari berbagai variasi, di antaranya bercorak simbolik dan bercorak aktual. Yang dimaksud dengan kekerasan simbolik yaitu manakala terdapat kelompok secara langsung, maupun tidak langsung menggunakan simbol, bahasa atau wacana yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan bersama. Kekerasan aktual terjadi manakala sekelompok penganut agama menggunakan kekuasaan untuk memaksa kelompok lainnya melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Kekerasan dapat dilakukan oleh kelompok mayoritas maupun minoritas, tergantung pada faktor-faktor yang memicu dan menyebabkannya.

Setiap komunitas agama dan kelompok memiliki idiomnya khas yang bersifat esoterik, yakni "hanya berlaku secara intern". Interpretasi seseorang terhadap ajaran agama orang lain bersifat

UIN Padangsidimpuan

[2] Paradigma radikal sering kali digunakan secara berbeda, sesuai dengan kepentingan yang diusung. Radikal bisa juga disebut dengan puritanisme, nativisme, ekstremisme, fanatisme, dan militanisme. Lihat: Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo dalam Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo (peny.), *Radikalisme Agama*, (Jakarta: PPIM-IAIN, 1998), h. xvi.

[3] Pelaku teror di India beragama Hindu, di Jepang beragama Tokugawa, di Irlandia beragama Protestan, di Filipina beragama Katolik, di Thailand beragama Buddha dan berbagai teror di belahan bumi lain dengan bingkai agama yang lain pula. Jadi, wajar kalau di Indonesia terdapat gerakan terorisme, maka yang melakukannya adalah orang Islam. Baca: Hasan M. Noor, "Islam, Terorisme dan Agenda Global" dalam Perta, Vol. V/ No. 02/202, h. 4-5.

tidak rasional dan absurd. Ketika ajaran agama ditafsirkan secara sepihak oleh penganut agama yang berbeda, maka akan menimbulkan konflik dan tindakan radikal karena menganggap bahwa ajaran agama orang lain salah.

Seiring dengan perkembangan sosial yang begitu cepat, tidak jarang mucul kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial tersebut disebabkan oleh gejala yang diikuti dengan perasaan kekecewaan, perasaan dendam, dan keadaan kontrol emosional yang tidak stabil dalam melawan kemapanan (*establishment*) pada kelompok-kelompok tertentu. Kemapanan bisanya dianologikan dengan kelompok elite penguasa (*ruling elite*) atau kelompok dominan, baik dari segi politik, ekonomi, maupun budaya. Gejala ketimpangan di masyarakat menjadi motivasi tersendiri dalam hal upaya memunculkan kesadaran dalam mencari faktor pengimbang dan kompensasi. Pencarian faktor tersebut diuraikan dalam dua bentuk, yaitu negatif dan positif. Pengimbang yang bersifat negatif adalah munculnya sikap-sikap radikal yang sering dijadikan mediator untuk mengisi kekecewaan dan ketidakpuasan tersebut.[4] Menurut Morris Janowitz, dampak dari perubahan sosial tersebut menimbulkan prasangka atau *stereotype* yang cenderung membangun dan penuh dengan pandangan tentang kelompok atau golongan tertentu, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menunjang terjadinya proses perubahan sosial yang bersifat positif menuju demokrasi dan pluralisme yang baik di kalangan masyarakat.

Dari aspek antropologis, masyarakat Tapanuli menurut Alvin Toffler merupakan suatu wilayah yang masyarakatnya masih berada dalam dua gelombang (*wave*) pertama peradaban umat manusia, yakni pertanian dan industri. Lebih lanjut, secara geografis masyarakat Tapanuli perdesaan memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan, sedangkan daerah perkotaan sebagai pusat kawasan industri. Masyarakat Tapanuli merupakan masyarakat heterogen. Keanekaragaman agama, dan budaya menjadi

[4] Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid,* (Jakarta: Paramadina-Mizan-CSL. 2006), Jilid I, h. 724.

kekayaan yang harus dikelola secara baik. Masyarakat Tapanuli hidup secara harmonis, saling menghormati dalam perbedaan, meskipun demikian terkadang terjadi konflik yang tidak bisa dihindari. Potensi radikalisme di wilayah Tapanuli bisa dilihat dari beberapa indikator, seperti Pembakaran gereja di Padang Lawas Tahun 2011. Bentrok Muslim dan non-Muslim yang terjadi di daerah Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2016 terkait dengan pelarangan beribadah bagi etnis Cina. Pada tahun 2017 terjadi konflik muslim dan non-Muslim di Aek Badak terkait dengan layanan fasilitas umum.[5] Di daerah Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal bentrok karena penistaan agama yang dilakukan non-Muslim, sehingga memicu kemarahan warga.

Belakangan ledakan bom di Sibolga pada hari Selasa 12 Maret 2019 saat Tim Densus 88 Anti Teror hendak menggeledah rumah Abu Hamzah yang berlokasi di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Gang Sekuntum, Pancuran Bambu, Sibolga.[6] Problem tersebut semakin meluas seiring dengan belum terbangunnya tatanan nilai sebagai masyarakat industri atau modern bagi mayoritas masyarakat Tapanuli. Artinya, pembangunan infrastruktur tidak bisa diikuti dengan pola pandangan yang masih bersifat tradisional. Era modernisasi yang terjadi saat ini baru terfokus pada bangunan fisik, sedangkan kesadaran dan pandangan dunia sebagai masyarakat tradisional yang memiliki beberapa ciri, yaitu mistifikasi beragama, membudayakan istilah paguyuban, dan semangat *patron-client* yang kuat, masih dipegang sebagai kesadaran hidup oleh masyarakat. Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan, terbentuk suatu kerangka pikir yang sangat menarik untuk diamati dan di dalami sebagai bentuk proses analisis sosial terhadap problematika pemikiran radikalisme di masyarakat.

Usman Pelly membagi sumber konflik di dalam kehidupan

[5] Wawancara, Rahmat Mujahid Harahap, Tokoh Agama di Padang Lawas pada tanggal 25 Agustus 2017.

[6] Abu Hamzah dengan nama aslinya Husein, terduga teroris ditangkap Densus 88 di Lampung merupakan anggota jaringan terduga teroris RIN yang berafiliasi dengan ISIS. Ledakan bom di Sibolga ini berasal dari disposal Polisi, demikian *detiknews* memberitakan pada hari Rabu, 13 Maret 2019.

bermasyarakat ke dalam tiga kelompok permasalahan. *Pertama*, permasalahan tentang perebutan alat-alat produksi, sumber daya, dan peluang ekonomi masyarakat; *kedua*, permasalahan tentang proses perluasan batas kelompok etnis dan sosial budaya di kehidupan masyarakat; dan *ketiga*, benturan yang terjadi terhadap kepentingan politik, agama, dan ideologi. Tiga aspek ini sering ditemukan pada komunitas masyarakat majemuk. Tingkat kejadian konflik dengan berbagai perbedaan yang terdapat pada kehidupan bermasyarakat dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu kategori horizontal dan kategori vertikal.

Faktor kategori horizontal mencakup etnis, keturunan (ras), agama, adat istiadat, bahasa daerah, dan kehidupan sosial politik. Adanya beberapa lokasi transmigrasi di daerah Tapanuli berarti telah memasukkan etnis, adat istiadat, dan kebudayaan Jawa ke daerah Tapanuli yang pada gilirannya akan membuat wilayah Tapanuli semakin multi/pluralis kultural. Kategori kemajemukan horizontal cenderung memiliki ciri *ascribed factors*, sedangkan kategori kemajemukan vertikal cenderung memiliki ciri *achievement factors*. Hal itu berdampak terhadap kesadaran kalangan masyarakat yang merupakan bagian golongan yang tertindas (*oppressed society*). Artinya, masyarakat yang tertindas dari perkembangan globalisasi dalam bentuk hegemoni industri yang belum mempertimbangkan aspek pemberdayaan masyarakat lokal dan malah lebih mementingkan kepentingan etnis dan agama tertentu saja. Sepertinya *prejudice* atau kecurigaan masyarakat dalam konteks ini semakin memuncak ketika pusat perekonomian hanya didominasi oleh kelompok non-Muslim dan pembangunan rumah ibadah bagi umat kristiani di tengah-tengah komunitas masyarakat muslim. Di sisi lain, di beberapa lokasi perumahan yang penduduknya kebanyakan non-Muslim, proses pembangunan masjid dan musala pun memperoleh perlawanan yang sama.

Pada konteks ini, sangat sesuai ketika Kuntowijoyo menyatakan bahwa konflik yang terjadi pada komunitas masyarakat tidak terlepas dari persoalan, ketimpangan sosial, pengangguran atau penghinaan akan mudah menyulut emosi tanpa harus dikompori

IAIN Pedangsidimpuan

oleh pihak ketiga.[7] Lebih lanjut, Komaruddin Hidayat membagi terjadinya gejala radikalisme agama dikarenakan politik dan agama yang belum berjalan sebagaimana seharusnya atau idealnya. Munculnya pandangan merasa tertindas, perasaan tersisih, dan tidak diperhitungkan dari aspek politis, bahkan munculnya perasaan hanya dianggap sebagai beban bahkan pengacau pada pembangunan menjadi sumber konflik utama yang berakhir pada munculnya sikap radikalisme agama. Saat sejumlah individu yang memiliki kepentingan laten yang sama saling mengadakan komunikasi yang intens demi kepentingan dan tujuan yang sama, maka aspirasi tersebut berubah menjadi suatu norma kelompok. Norma kelompok tersebut disebut sebagai suatu *struggle group* atau kelompok pejuang.[8]

Pluralisme, kerukunan, dan toleransi beragama pada dasarnya bukanlah istilah yang baru di kalangan masyarakat Tapanuli. Hidup bersama dan saling berdampingan dengan kelompok non-Muslim, terkhusus dengan etnis Cina yang beragama Buddha, Hindu, dan Konghucu telah berlangsung lama. Kuil-kuil kuno yang terdapat di daerah pemukiman masyarakat menjadi salah satu bukti sejarah yang menggambarkan kehidupan yang berjalan harmonis antar-umat beragama di daerah Tapanuli. Tradisi keagamaan etnis Tapanuli yang telah diturunkan dari generasi ke generasi masih dijalankan meskipun situasi saat ini berjalan dinamika kehidupan modern dan gaya hidup serta infiltrasi negatif budaya asing semakin menguat. Faktor perbedaan keagamaan menjadi potensi dan kekuatan dalam upaya mempertahankan dan membangun spiritual pada kehidupan bermasyarakat. Tradisi keagamaan pada masyarakat muslim, seperti ceramah agama, pengajian rutin, selawat, tahlil, dan ratiban tetap dijalankan sebagai nilai-nilai keagamaan yang telah ada sejak dahulu. Bahkan

UIN Padangsidimpuan

[7] Mulyana, W. Kusuma, "Analisis Sosial tentang Kerusuhan Massa Kasus Pemilu 1997", dalam Ahmad Suaedy (ed.), *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, (Jakarta: Grasindo-P3M, 2000), h. 69.

[8] Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, terj. Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004), h. 34.

pendidikan keagamaan tradisional dalam bentuk pondok pesantren tetap eksis hingga saat ini. Jumlah pondok pesantren di daerah Tapanuli lebih dari 100 pondok pesantren dengan jumlah kiai sekitar 330 dan 15.768 santri. Beberapa konflik dan ketegangan yang terjadi di daerah Tapanuli dapat diredam dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Padangsidimpuan telah memberikan kontribusinya melalui program-program kerja yang terencana, seperti:

1. *Workshop* kurikulum dengan memasukkan SKB 3 Menteri, termasuk di dalamnya tentang pendirian rumah ibadah ke dalam kurikulum SLTA dan SLTP.
2. Apel kurikulum ke sekolah-sekolah SLTA. FKUB menjadi pembina upacara.
3. Studi banding ke daerah Umbang Hasundutan, suatu daerah yang mayoritas non-Muslim di daerah Tapanuli.
4. Lomba karya tulis ilmiah tentang kurikulum umat beragama di Tapanuli.
5. Sosialisasi kurikulum ke kecamatan-kecamatan yang melibatkan tokoh agama (toga), tokoh adat (toda), dan tokoh masyarakat (tomas).
6. Verifikasi pendirian rumah ibadah di Padang Matinggi.
7. Berperan aktif mengkondusifkan kerukunan umat beragama di Padangsidimpuan. Kita dapat membuat gambaran ketika terjadi konflik antar-umat beragama di Kabupaten Mandailing Natal, banyak tokoh agama dan masyarakat yang minta perlindungan ke Kota Padangsidimpuan.
8. Memberikan penyuluhan kepada Naposo Nauli Bulung dan Organisasi Kepemudaan tentang peran penting kerukunan umat beragama.
9. Kegiatan memperkuat kerukunan umat beragama ke lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan, seperti PGI, kantor Buddha, dan MUI.[9]

[9] SP, Ketua FKUB Kota Padangsidimpuan, wawancara di Kota Padangsidimpuan tanggal 10 Mei 2019. Program kerja yang telah direncanakan adalah memberikan masukan ke pemerintah daerah tentang poin-poin dan peta kerukunan umat beragama di Tapanuli

IAIN Padangsidimpuan

Model lain manajemen konflik yang diterapkan yaitu dengan menggunakan pendekatan budaya (kearifan lokal). Dalihan Natolu menjadi salah satu instrumen meredam konflik yang terjadi di kalangan masyarakat. Konflik lokal yang dimaksudkan adalah masalah yang dihadapi masyarakat di sekitar tempat tinggalnya yang melibatkan orang atau kelompok orang dalam skala yang relatif sempit seperti wilayah kabupaten. Konflik ini melibatkan komponen-komponen masyarakat yang saling berdekatan atau konflik antarkelompok individu yang berada dalam satu masyarakat.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi, yaitu:

1. Terjadi konflik berupa teror di daerah yang notabene merupakan daerah yang selama ini aman dan damai.
2. Terjadi konflik agama di daerah yang memiliki penduduk berlainan keyakinan atau agama kepercayaan.
3. Terjadi konflik sosial di lingkungan masyarakat yang diakibatkan kurangnya kekuatan masyarakat dalam mengimbangi efek globalisasi.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan batasan masalah di atas untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis membatasi studinya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat Tapanuli?
2. Bagaimana dampak sosial masyarakat terhadap tindakan radikal di Tapanuli?

terutama pascapilpres dan pilkada, membentuk FKUB di kecamatan-kecamatan, mengikuti pertemuan-pertemuan keagamaan nasional dan internasional, memberikan penyuluhan kepada masyarakat kota lintas agama tentang kerukunan umat beragama, memberikan materi pada siswa tentang pelatihan (spesifikasi) umat beragama, membuat *training of trainer* tentang masyarakat kerukunan umat beragma.

IAIN Padangsidimpuan

3. Bagaimana model resolusi konflik yang digunakan oleh aktor terkait, untuk meredam dan menyelesaikan konflik, serta faktor apa saja penyebab terjadinya tindakan radikal di masyarakat Tapanuli.

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, tujuan pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengetahui bentuk konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat Tapanuli.
2. Mengetahui dampak sosial masyarakat terhadap tindakan radikal di Tapanuli.
3. Mengetahui model resolusi konflik yang digunakan oleh aktor terkait, untuk meredam dan menyelesaikan konflik, serta faktor apa saja penyebab terjadinya tindakan radikal di masyarakat Tapanuli.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat praktis dan manfaat empiris. Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk mendalami setiap konflik yang terjadi di daerah Tapanuli, kemudian mendalami penyebab terjadinya konflik tersebut, dan pada akhirnya menemukan solusi untuk masalah tersebut.

Manfaat empiris dari penelitian ini bagi masyarakat adalah agar masyarakat mamahami dan mewaspadai setiap penyebab konflik yang terjadi di daerah Tapanuli. Manfaat untuk pemerintah dan tokoh-tokoh (agama dan adat) di daerah Tapanuli khususnya yaitu untuk memahami dan menambah perbendaharaan model-model resolusi konflik yang sesuai diterapkan untuk mengatasi setiap konflik yang ada di lingkungan masyarakat.

Arif Padangsidimpuan

BAB 2

LANDASAN TEORI

IAIN Padangsidimpuan

A. KAJIAN TEORI

1. Definisi Konflik

Konflik berasal dari bahasa Inggris yaitu "*conflict*" yang tergolong sebagai interaksi sosial dalam proses disosiatif. Proses disosiatif dalam kajian sosiologi meliputi persaingan, kontraversi, pertikaian, dan terakhir adalah konflik. Kesimpulan kesemuanya ialah mendapatkan apa yang diinginkan secara bersama atau secara individu. Konflik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, baik konflik berskala kecil, sedang, maupun besar. Manusia tidak akan pernah terlepas dari konflik, karena manusia hidup dan menjalani kehidupannya berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya yang mana terdapat struktur yang mengatur sedemikian rupa sehingga terbentuklah suatu tatanan masyarakat yang kompleks. Kemudian, interaksi sosial yang dilakukan oleh individu dalam bermasyarakat juga menjadi pemicu terjadinya konflik. Interaksi di dalamnya juga diatur oleh struktur sosial yang mengatur perilaku dan memengaruhi personal seseorang atau bahkan membentuknya. Kesimpulannnya, interaksi sosial yang diatur oleh struktur sosial akan menimbulkan konflik dan

akan membentuk personalitas manusia.

Karl Marx sebagai pencetus awal mula teori konflik berpendapat bahwa tujuan utama masyarakat menjalani kehidupan seutuhnya adalah menciptakan kondisi masyarakat tanpa kelas atau strata (*sosialisme*), dalam hal ini diidentikkan dengan konflik kelas sosial yang merupakan sumber yang paling urgen dan sumber paling berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Lebih lanjut, Ralf Dahrendorf menjelaskan bahwa semua perubahan sosial yang dialami setiap manusia merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Dahrendorf sangat yakin bahwa konflik dan pertentangan menjadi bagian hidup masyarakat.

Dari penjelasan mengenai beberapa teori konflik menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip yang mendasari adanya teori konflik yaitu konflik sosial dan perubahan sosial yang selalu tersedia di dalam struktur kehidupan masyarakat. Pandangan ini juga didasari pada sistem sosial masyarakat pada masa itu yang terdiri dari pembagian, borjuis, dan proletar.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik di dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai berikut:

a. Perbedaan Individu.
   Setiap inidividu yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat akan senantiasanya mengalami perselisihan, perselisihan ini sendiri meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, yang kedua hal tersebut menjadi penyebab timbulnya konflik dalam masyarakat.
b. Kebudayaan.
   Faktor kedua yang menjadi penyebab timbulnya konflik dalam masyarakat, adalah perbedaan latar belakang kebudayaan yang satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula, contoh nyata dalam kasus ini mengenai perilaku dan tata bicara masyarakat Indonesia yang memiliki karekteristik tidak sama, antara masyarakat Papua dan Masyarakat Jawa Tengah.
c. Kepentingan.
   Banyaknya perbedaan kepentingan yang ada dalam masyara-

IAIN Padangsidimpuan

kat, antara individu dan kelompok, di antaranya menyangkut bidang ekonomi, politik, dan sosial. Bidang politik sering kali menjadi penyulut timbulnya konflik masyarakat, yang umumnya karena kekuasaan. Begitu pula perbedaan ekonomi, dengan ada status sosial dalam masyarakat, antara miskin dan kaya, menjadi penyebab adanya konflik yang sulit dihindari.

d. Perubahan Sosial.
   Faktor penyebab adanya konflik dalam masyarakat, yang selanjutnya adalah perubahan sosial. Perbuahan ini faktor alamiah lantaran memang hakikat manusia senantiasa berubah. Yang pasti perubahan-perubahan yang sering kali menjadi penyebab konflik adalah perubahan pada nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.
e. Interaksi Sosial.
   Pengertian interaksi sosial yang sering kali menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik dalam masyarakat banyak disebabkan karena ketidakharmonisan. Yang akhirnya interaksi sosial tersebut tidak bisa dijalankan, semakin seseorang melakukan interaksi sosial maka semakin riskan pula konflik yang akan ditimbulkan.

2. Jenis-jenis Konflik

Berdasarkan kajian mengenai penyebab terjadinya teori konflik, maka jenis-jenis konflik dibedakan menjadi empat jenis konflik:

a. Konflik agama, adalah konflik yang terjadi apabila dalam suatu masyarakat terdapat sejumlah perbedaan pendapat tentang keyakinan beribadah dan ajaran agama masing-masing. Konflik ini banyak menimbulkan masalah intens dalam perkembangan di dunia. Agama sebagai bagian kebutuhan hidup bergantung pada keyakinan yang dimiliki umat manusia. Oleh karenanya konflik paling berat dampaknya dibandingkan dengan konflik lainnya adalah konflik agama. Konflik keagamaan ini dianggap berdampak besar karena berkaitan langsung dengan keyakinan di dalam diri setiap individu sehingga apa pun akan dilaksanakan untuk mempertahankan keyakinan tersebut.

UIN Padangsidimpuan

b. Konflik politik, adalah jenis konflik yang terjadi di dalam dunia politik, konflik ini banyak dilatarbelakangi dengan adanya keinginan untuk berkuasa. Oleh karena itulah, keinginan berkuasa acap kali memandang segala kebutuhan hidup dan menghalalkan sesuatu hal. Konflik politik memang tidak akan sering terjadi, namun dampaknya bisa memecah belah masyarakat apabila tidak bijaksana diselesaikan. Konflik politik bisa dilatarbelakangi dengan adanya politik identitas yang mana, dengan kekehan dan kekukuhan hatinya masyarakat sering mengalami pergesekan satu sama lainnya. Jadi, singkatnya, jenis konflik ini bagian daripada dinamika kehidupan masyarakat.
c. Konflik budaya, merupakan konflik yang terjadi apabila dalam suatu masyarakat terdapat sejumlah kebudayaan khusus yang bersifat tertutup. Kebudayaan ini dianggap aneh sehingga menjadikan pandangan masyarakat memiliki dasar pengetahuan yang bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk sikap mengenai ketidakterimaan dalam perubahan sosial.
d. Konflik kelas sosial, jenis lainnya penerapan dalam kajian teori konflik sebagai akibat kelompok menciptakan peraturan sendiri untuk melindungi kepentingannya. Pada kondisi ini, terjadi eksploitasi yang berlawanan antara masyarakat kelas atas kepada masyarakat yang berada di kelas bawah. Kedua masyarakat dalam kelas sosial akan mendapatkan serta menentang hak-hak istimewa kelas.

IAIN Padangsidimpuan

3. Islam vs. Konflik

Konflik memang tidak terlepas dari kehidupan, namun menanggapi konflik dengan bijak akan dapat meminimalisasi konflik yang terjadi sehingga dampak yang harus diterima oleh masyarakatpun semakin sedikit. Agama Islam mengajarkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara manusiawi. Tidak ada istilah diskrimansi, kekerasan, kejahatan atas nama agama. Namun ada banyak sekali kekerasan yang terjadi, tidak hanya antara individu-individu tetapi juga antara kelompok sosial dan etnik, antarkelas,

ras, bangsa, dan agama. Setiap orang memiliki hak untuk hidup, maka sebagai umat beragama harus menunjukkan toleransi dan rasa hormat terhadap yang lain.

Islam yang hadir di tengah-tengah masyarakat Arab dikenal dengan istilah Jahiliah, amoral, sekaligus nir-etika. Arab pra-Islam selalu menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Tidak ada konsep spiritual dan moral luhur dalam masyarakat Arab pada masa itu. Kehadiran Islamlah yang menjadikan moralitas luhur pada masyarakat, menghargai kemausiaan serta senantiasa menebar kedamaian, sebagaimana sapaan yang diucapkan ketika bertemu dengan orang lain yakni "*Assalamu"alaikum*" (semoga keselamatan atas kamu). Menurut Hasan Hanafi, esensi Islam bukan sekadar agama ritual, bukan sebatas pada area mengenai supranatural, dogma, dan institusi. Melainkan sebagai suatu etika kemanusiaan dan ilmu sosial atau ideologi. Kemanusiaan merupakan basis bagi etika global Islam. Memperjuangkan etika global tersebut (kemanusiaan) merupakan bentuk jihad yang paling konkret dalam kehidupan kontemporer ini.

Islam merupakan agama yang memiliki visi yang sangat progresif dalam merespons sekaligus mengubah masyarakat. Baik itu mengubah pola atau sistem kehidupan masyarakat sekaligus menawarkan suatu paradigma yang relevan dengan struktur, tradisi, dan budaya masyarakat pada masa itu. Islam hadir setelah rusaknya tatanan masyarakat (ekonomi, politik, dan sosial). Selain itu, rasa persaudaraan memudar, rasa kebencian, dan permusuhan dikedepankan. Budaya persamaan (egalitarian) melemah, konglomerasi, kapitalisasi, dominasi ekonomi, dan politik oleh segelintir orang kuat juga terjadi. Tugas kenabian tidak lain ialah untuk memberikan solusi sekaligus mengubah kondisi tersebut.

Namun berbagai problema yang terjadi di lapangan seolah memojokkan ajaran agama Islam. *Image* yang ditunjukkan yaitu seolah Islam itu adalah agama dengan penuh kekerasan dan tidak manusiawi. Tidak dimungkiri, bahwa beberapa oknum memiliki paham ektremis terhadap ajaran agama Islam yang mencoreng nama Islam itu sendiri. Namun Islam sejatinya adalah agama

UIN Pascasarjana

yang damai dan sangat cinta dengan kedamaian. Islam memiliki cara tersendiri dalam mengatasi paham-paham ekstremis yang merugikan dan mencoreng nama baik Islam itu sendiri.

Cara mengatasi permasalahan menurut Islam, yaitu: *Pertama*, melakukan *al-tabayun* (klarifikasi). Dalam hal ini, *al-tabayun* dijadikan sebagai upaya mencari kejelasan dan klarifikasi atas sebuah informasi, terlebih informasi yang masih simpang siur kejelasannya, yang dapat menimbulkan fitnah dan konflik. Spirit *al-tabayun* dikatakan dalam Al-Qur'an untuk menguji kebenaran informasi dari seorang *fasiq* (QS. *al-Hujurat*: 6). *Kedua*, melakukan *tahkim* (upaya mediasi). Dalam hal ini, upaya *tahkim* dilakukan sebagai salah satu cara mendamaikan dua belah pihak yang tengah berkonflik dengan mendatangkan mediator sebagai juru damai, sebagaimana dikatakan dalam QS. *an-Nisa'* (4): 35. Sebagai catatan bahwa seorang mediator harus "berdiri di tengah". Artinya, tanpa memihak dan bersimpati kepada salah satu pihak yang tengah berkonflik. Ia seharusnya mendorong dan mengondisikan kedua pihak tersebut ke arah perdamaian. *Ketiga*, melakukan *al-syura* (musyawarah). Upaya ini ditempuh guna memecahkan persoalan (baca: mencari solusi) dengan mengambil keputusan bersama. Hal ini dianggap penting dalam kasus terjadinya konflik. Pentingnya musyawarah ditegaskan dalam QS. *Ali Imran* (3): 158. *Keempat*, sikap *al-'afwu* (saling memaafkan). Ketika terjadi konflik, maka masing-masing pihak cenderung mempertahankan ego sektoral mereka. Sehingga *al-'afwu* merupakan indikator awal lahirnya kebaikan dan ketakwaan seseorang (QS. *al-Baqarah* [2]: 237), yang mampu menciptakan kondisi perdamaian dalam kehidupan manusia.

Kelima, tekad *al-ishlah* (berdamai). Setelah upaya saling memaafkan, maka tekad untuk berdamai pun menjadi sebuah keharusan. Sebab Al-Qur'an sendiri menegaskan untuk berdamai dalam berteologi/berkeyakinan (QS. *al-Baqarah* [2]: 208). Bahkan ayat ini ditafsirkan sebagai ayat perdamaian. Sebagaimana penafsiran Ibnu 'Asyur dalam karyanya, *al-Tahrir wa al-Tanwir*. Ia menafsirkan kata *al-silmi* dalam ayat tersebut dengan pengertian *al-sulh* (perdamaian),

dan *tark al-harb* (meninggalkan peperangan). *Keenam*, sikap *al-'adl* (berlaku adil). Keadilan (*al-'adalah*) merupakan suatu keniscayaan dalam menciptakan kondisi damai dan harmoni. Sebab kezaliman (lawan dari keadilan) pada dasarnya akan menyulut konflik bagi pihak yang dizalimi. Term yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk menyebut keadilan sangatlah beragam, seperti *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Keadilan merupakan indikator ketakwaan seseorang (QS. *al-Maidah* [5]: 8), sementara ketakwaan akan mengantarkan kepada keberkahan, kesejahteraan, dan kedamaian (QS. *al-A'raf* [7]: 96). *Ketujuh*, adanya *al-hurriyah* (jaminan kebebasan). Al-Qur'an sangat menjunjung tinggi kebebasan, termasuk kebebasan dalam menentukan keyakinan atau agama (*al-Baqarah* [2]: 256). Bahkan Allah memberikan kebebasan apakah seseorang itu mau beriman atau kafir (*al-Kahfi* [18]: 19). Oleh karena kebebasan merupakan hak setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan, tidak ada pencabutan hak atas kebebasan kecuali dibawa dan setelah melalui proses hukum yang tepat nan benar.

Sebagian besar gerakan ekstremisme di Indonesia dalam dekade terakhir ini adalah berasal dari gerakan organisasi Islam transnasional yang melibatkan berbagai negara dalam jejaring yang luas dan strategis. Misi mereka hanya satu, ingin menampilkan dunia dan hukum-hukum sosial dengan hukum Tuhan, di tengah kemajuan modernisme yang mereka anggap mengancam dan berbahaya.

Islam sebagai agama yang selama ini menjadi korban dari keganasan ekstremisme yang mengatasnamakan hukum Tuhan, begitu dirugikan dan banyak pandangan tentang Islam menjadi semakin sempit. Hal ini tentu saja merupakan sebuah pereduksian terhadap ajaran Islam yang begitu mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan toleransi.

Kaum ekstremis paling getol dalam memaknai ayat-ayat perang sebagai sebuah instrumen yang mereka anggap dapat melahirkan nilai-nilai instrumental dalam menghadapi tantangan zaman. Padahal, apa yang mereka lakukan adalah tak lebih dari kecenderungan barbarisme yang diliputi oleh rasa kebencian dan

UIN Sunan Kalijaga

penuh dendam.

Liberalisme dan sekularisme memang bukanlah jalan terakhir, orang-orang di zaman modern sekarang mencoba memproyeksikan seluruh potensi sistem untuk mencapai suatu kemakmuran, kemerdekaan, dan yang lebih penting adalah tercapainya hak-hak asasi manusia secara universal di mana setiap orang berhak untuk memegang prinsip sesuai dengan koridor individualisme yang dimiliki.

Sejak negara Indonesia didirikan, para *funding father* telah sepakat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berbasis pada demokrasi. Dalam Pancasila Sila Pertama disebutkan "Ketuhanan Yang Maha Esa", sila ini mengindikasikan bahwa Indonesia tidak akan pernah berdiri atas nama agama tertentu, semua agama dapat hidup subur dan berdampingan satu sama lain.

Kita telah sepakat, bahkan sejak negara ini berdiri, bahwa Islam tidak akan pernah menjadi dasar negara, arti filosofis yang paling mendasar dari Sila Pertama adalah bahwa negara dan Pancasila sebagai ideologi, menjamin rakyatnya untuk beragama, berkeyakinan dan memiliki prinsip yang teguh terhadap nilai-nilai transendental. Nilai-nilai inilah yang kemudian menciptakan suasana harmoni, kesejukan, dan kedamaian bagi sesama.

Sikap toleransi sebenarnya telah mengakar kuat dalam psikologi bangsa Indonesia, gerakan ekstremisme transnasional hanyalah bentuk dari kegagalan cara berpikir dalam beragama yang justru akan merusak agama dari dalam.

Kita bisa melihat beberapa kasus pengeboman di Indonesia dalam dua dekade terakhir yang dilakukan oleh kelompok Islam tertentu, cara beragama mereka tidak khas Indonesia, mereka tidak memiliki sikap nasionalisme dan cinta Tanah Air, mereka hanya berpikir bahwa sesuatu yang tidak "islami" layak untuk dibumihanguskan.

Meski begitu, perlu disadari bahwa gerakan ekstremisme di Indonesia sebenarnya telah tumbuh begitu subur, seperti pepatah "hilang satu tumbuh seribu" dan "patah tumbuh hilang berganti". Penumpasan terhadap gerakan ekstremisme tidak lantas

IAIN Padangsimpuan

membuatnya hilang begitu saja, ia sering kali muncul lagi secara tidak terduga, cepat, dan pemerintah melalui aparatusnya sering kecolongan dalam menelusuri embrio-embrio baru dari kelahiran ekstremisme ini.

Dapat dipahami bahwa sebenarnya gerakan ekstremisme ini tidak bisa dibayangkan sebagai suatu tindak kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh kelompok atau pelaku tertentu, ekstremisme lebih merupakan sebuah gerakan ideologis, sebentuk keyakinan terhadap nalar ketuhanan yang diproyeksikan untuk mengubah semua tatanan sejalan dengan kehendak Tuhan.

Sebagai ideologi, ekstremisme lebih tepat disebut sebagai sistem, sebuah sistem yang datang dari langit. Mereka menolak misalnya, seluruh sistem partikular yang lahir di bumi. Itu artinya bahwa hukum positif, sekularisme, demokrasi, dan modernisme yang lahir dari pergolakan umat manusia sepanjang sejarah dan menemukan momentum puncaknya di era kontemporer ini, oleh kelompok ekstremis dianggap menyalahi kodrat Ilahi. Dengan demikian, sistem ideologis gerakan ekstremisme ini begitu sulit untuk ditumpas.

Jika ditelusuri secara historis, hubungan antara agama dan kekerasan memang begitu dekat. Bahkan bisa dikatakan bahwa usia jenis ekstremisme ini juga seumuran dengan agama itu sendiri. Begitu banyak darah mengalir akibat perang atas nama agama, ini sesungguhnya terjadi hampir di semua agama di dunia. Namun demikian, sejauh ini, Islam yang paling dianggap dekat dengan aksi-aksi kekerasan atas nama agama.

Dalam konteks gerakan ekstremisme Islam, sebenarnya ada beberapa teori yang dapat menjelaskan: *pertama*, kegagalan umat Islam dalam menghadapi arus modernisme yang dianggap banyak menyudutkan umat Islam. Dalam konteks ini, mereka banyak menentang modernisme dengan seluruh sistem yang ada di dalamnya, dengan mencari dasar-dasar agama melalui dalil yang baku, bentuk pencarian yang paling radikal mudah terjauh pada arus ekstremisme atau kekerasan.

Kedua, kecenderungan gerakan ekstremisme ini berdasar pada

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

solidaritas atas sesama umat Islam. Seperti tragedi yang menimpa umat Islam di Palestina, Irak, dan banyak negara di Timur Tengah yang dianggap menjadi korban dari kebijakan salah kaprah Amerika dan Zionis Israel. Dalam konteks ini, paling tidak, gerakan mereka diproyeksikan untuk menentang seluruh kekuasaan politik ketika Islam sebagai umat dan negara telah terancam dari luar.

Ketiga, mereka menganggap bahwa hanya hukum Tuhan yang layak dan tepat untuk menerapkan seluruh sistem yang ada di muka bumi ini. Mereka mendirikan organisasi dan kekuatan politik berbasis Islam untuk menyatukan ide-ide keislaman dan menolak seluruh sistem yang tidak islami. Dalam konteks ini, mereka percaya bahwa jika Islam tidak membangun kekuatan politik, maka Islam bisa kapan saja hancur, baik dari dalam maupun dari luar.

Keempat, dalam konteks Indonesia, gerakan ekstremis ini sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah atas banyaknya fenomena ketidakadilan, ketimpangan sosial, dan korupsi yang begitu akut. Mereka percaya bahwa dengan menerapkan sistem syariat Islam, Indonesia akan terselamatkan dari kondisi-kondisi akut ini.

Namun demikian, karena cara beragama mereka begitu sempit dan tidak bisa melihat betapa beragam dan pluralnya masyarakat di Indoensia, pada akhirnya mereka justru terjebak pada problem epistemologis, khususnya dalam menghadapi kompleksitas masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Islam sebagai agama yang dipercaya dapat merumuskan nilai-nilai instrumental dalam menghadapai tatangan zaman, tidak begitu saja dapat diterapkan sebagai sebuah sistem negara.

Memang harus diakui bahwa sistem demokrasi di Indonesia sekarang ini belumlah mapan atau sempurna, ada banyak hal yang perlu diperbaiki, namun demikian bukan berarti penggantian sistem negara menjadi keharusan, kita sebenarnya tidak memiliki cara lain selain demokrasi ini, mengingat kultur bangsa ini sangat dekat dengan nilai-nilai demokrasi.

Sikap toleransi dan pluralis sebagai kepanjangan dari demokrasi tersebut, juga telah tertanam kuat di tubuh bangsa Indonesia. Jika dilihat para taraf jangka panjang, tampaknya demokrasi inilah

IAIN Padangsidimpuan

yang dapat membahwa bangsa ini pada cita-cita luhurnya, yakni kesejahteraan dan kemerdekaan bagi sesama. Ini adalah cita-cita bersama yang harus dipelihara dan diwujudkan tidak atas nama golongan dan agama tertentu, tetapi atas nama kemanusiaan dan atas nama keindonesiaan.

Penanggulangan terhadap gerakan ekstremisme ini memang tidak mudah dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Kekuatan ideologis, haruslah dilawan dengan kekuatan ideologis. Pancasila sebagai ideologi paripurna yang dapat menyatukan seluruh keragaman dan perbedaan haruslah menjadi garda depan bagi tertanamnya nilai-nilai nasionalisme yang kuat.

Juga, masyarakat di Indonesia sekarang ini sebenarnya masih berapa pada taraf sikap toleransi, yakni sikap saling menghargai perbedaan sebagai bentuk rahmat dari Tuhan, itulah kenapa gerakan ekstremis dapat hidup subur di Indonesia. Di samping itu, tentu juga harus dikedepankan nilai-nilai pluralis di mana pengakuan terhadap perbedaan sebagai bagian penting dari eksistensi.

Tidaklah cukup jika menumpas gerakan ekstremisme ini hanya dengan membunuh atau menumpasnya dengan cara-cara menghilangkan atau membumihanguskan, karena mereka akan terus hidup dan ini lagi-lagi bukan soal pelaku siapa dan di mana.

Jadi, kekuatan ideologis seperti Pancasila haruslah lebih dikedepankan. Pemerintah sebagai otoritas tertinggi yang memiliki tanggung jawab dalam stabilitas negara, harus benar-benar bisa memastikan rakyatnya tidak terjerumus dalam ekstremisme. Sering kali gerakan ini tumbuh subur di lingkungan pendidikan dan tempat-tempat ibadah serta majelis ilmu.

Para perekrutnya biasanya mencari anak-anak muda yang masih pada taraf pencarian terhadap jati diri. Itulah kenapa lembaga pendidikan dan tempat ibadah begitu subur menjadi tempat perekrutan. Pemerintah juga harus terus sigap terhadap seluruh kondisi yang ada, misalnya, lebih melakukan penjagaan ketat terhadap universitas, masjid, dan tentu saja setiap figur publik seperti dai-dai harus dipastikan bahwa pemahaman mereka tidak keluar dari koridor nasionalisme.

IAIN Pedangsidimpuan

4. Radikalisme

Konflik keagamaan sering muncul dalam masyarakat yang plural. Pluralisme dan radikalisme sebagai *opposition binner* yang sangat sulit dikompromikan, tetapi juga tidak mungkin dipisahkan. Khaled Aboul Fadl[1] melihat akar radikalisme agama bersumber dari pemahaman yang tertutup dan mencerminkan karakter yang absolutis serta tidak mau berkompromi dengan penafisiran yang berbeda dalam memahami agama. Model pemahaman seperti ini memiliki kecenderungan untuk memperkuat pengelompokan diri, pemaksaan atas kebenaran sendiri, sering juga disebut dengan puritanisme. Lebih jauh ada yang memperbolehkan untuk melakukan penyerangan dan kekerasan, berlaku agresif terhadap pihak lain yang tidak sealiran. Aden Rosadi[2] mengatakan pluralisme selalu mengedepankan paradigma yang didasarkan pada nilai-nilai humanis, inklusif, dan opensif. Adapun radikalisme lebih mengedepankan prinsip eksklusif, tertutup, defensif, dan terkesan meniadakan orang lain.

Dalam kajian sejarah ditemukan bahwa ulama dan fikih telah mampu memberikan warna yang kuat dan *legitimed* terhadap pemahaman keagamaan masyarakat di luar hukum positif yang ditetapkan pemerintah. Agama memiliki simbol-simbol yang suci. Simbol ini merupakan dasar bagi pemeluknya untuk bertindak dalam bentuk tradisi ritual keagamaan sebagai implementasi keyakinannya. Oleh Nur Syam[3] membincangkannya dengan term Islam murni/Islam *official* dan Islam populer/rakyat. Islam murni atau Islam *official* merupakan kegiatan pelaksanaan tradisi keagamaan yang bersumber dari ajaran agama, sedangkan Islam populer atau Islam rakyat dianggap tidak memiliki sumber asasi di dalam ajaran agama Islam. Jika potensi pemahaman dan sumber ajaran

IAIN Padangsidimpuan

[1] Khaled Abou el-Fadl, *The Great Theft: Wresting Islam from the Extremists,* (New York: HarperCollins Publisher, 2005), h. 3.

[2] Aden Rosadi, "Radikalisme dan Pluralisme Agama: Konflik Antar-Umat, Agama dan Realsi Kekuasaan Industri di Kabupaten Bekasi" *Jurnal Adliya,* Vol. 8, No. 2 Edisi Juli-Desember 2014, h. 279-280.

[3] Nur Syam, *Islam Pesisir,* (Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 18.

agama ini tidak dikelola dengan baik, sangat memberi peluang bagi munculnya pemahaman dan tindakan yang bersifat radikal.

Dari aspek nilai, ada persamaan antara tradisi ritual keagamaan dan kearifan lokal. John Habs[4] menjelaskan kearifan lokal sebagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dikenal, dipercaya, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mempertebal kohesi sosial. Sistem tradisi dalam masyarakat merupakan salah satu faktor dalam mewujudkan kehidupan harmonis.

Dalam perubahan masyarakat globalisasi dan demokratisasi muncul arus kecil yang disebut oleh Thomas Reuther[5] sebagai arus revitalisasi tradisi, suatu cara untuk menanggapi radikalisme secara dialogis dan absorpsi. Munculnya gerakan revitalisasi tradisi dan agama yang bersifat lokal tetapi memiliki akar yang kuat serta membangun suatu tradisi harmoni yang baru, oleh Reuther merupakan respons atas radikalisme agama yang muncul, setidaknya ini terjadi di Asia. Revitalisasi tradisi dan ritual lokal yang melibatkan masyarakat seluas mungkin dengan pemaknaan yang baru merupakan arus baru yang membawa kembali semangat toleran dan dialog.

Kuntowijoyo, memperkenalkan objektivikasi merupakan cara memahami agama serta peran budaya lokal yang memengaruhi perilaku sosial keagamaan masyarakat. Corak keberagamaan masyarakat tidak terlepas dari pengaruh agama dan budaya yang saling memengaruhi. Tentu saja sudah niscaya, daripada hanya melakukan penialian-penilaian normatif teologis semata terhadap kedua entitas ini, maka pengkajian dan penelitian jauh lebih penting dan memiliki kontribusi akademis.[6]

Terkait perbincangan sekitar radikalisme dan pluralisme

IAIN Padangsidimpuan

[4] Pardianto, "Komunikasi Agama dan Kearifan Lokal: Dimensi Pesan dan Saluran Komunikasi Agama Masyarakat Maluku" dalam *Jurnal Komunikasi Islam,* Vol. 07, No. 02, Desember 2017, h. 4.

[5] Thomas Reuther and Alexander Horstman (eds.), *Faith in the Future: Understnading the Revitalization of Religion Cultural Tradition in Asia,* (Leiden: Brill, 2013).

[6] Roibin, "Agama dan Budaya: Relasi Konfrontatif dan Kompromistik" *Jurnal Hukum dan Syariah,* Volume I, No. 1, 2010, h. 21.

agama, Aden Rosadi[7] setidaknya ada dua hal yang disampaikan, yakni *pertama,* intensnya kegiatan ekonomi dan terintegrasi ke dalam kapitalisme industri di era industrialisasi setidaknya dapat berdampak pada terjadinya krisis identitas yang berdampak pada munculnya sikap oposisi di beberapa masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan agama-agama lain. Kondisi ini menggambarkan bagaimana kesadaran masyarakat terkait makna pentingnya menerapkan paradigma toleransi beragama, terbuka, dan lebih pluralis di tengah-tengah perkembangan industrialisasi. *Kedua,* dampak dari perubahan tersebut adalah munculnya sikap radikalisme masyarakat yang mengatasnamakan term agama. Pembangunan rumah ibadah umpamanya, dapat memunculkan sikap yang berbeda, bagi pemeluk agama merupakan rumah suci tempat beribadah, sedangkan bagi penganut agama lain dapat merupakan suatu bahaya yang mengancam eksistensi agama mereka.

Radikalisme yang berujung pada terorisme menjadi masalah penting bagi umat Islam Indonesia dewasa ini. Dua isu itu telah menyebabkan Islam dicap sebagai agama teror dan umat Islam dianggap menyukai jalan kekerasan suci untuk menyebarkan agamanya. Sekalipun anggapan itu mudah dimentahkan, namun fakta bahwa pelaku teror di Indonesia adalah seorang Muslim garis keras sangat membebani psikologi umat Islam secara keseluruhan.

Keterlibatan berbagai pihak dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme sangat diharapkan. Tujuannya adalah untuk mempersempit ruang gerak radikalisme dan terorisme, serta kalau perlu dihilangkan sama sekali. Dalam konteks di atas, peran sekolah dan lembaga pendidikan sangat penting dalam menghentikan laju radikalisme Islam.[8]

Balai Pustaka

[7] Aden Rosadi, "Radikalisme dan Pluralisme Agama: Konflik Antar-Umat, Agama dan Realsi Kekuasaan Industri di Kabupaten Bekasi" *Jurnal Adliya,* Vol. 8, No. 2 Edisi Juli-Desember 2014, h. 279-280.

[8] Munip, "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah."

5. Pendidikan dan Radikalisme

Pendidikan dan lembaga pendidikan sangat berpeluang menjadi penyebar benih radikalisme dan sekaligus penangkal (baca: deradikalisasi) Islam radikal. Studi-studi tentang radikalisme dan terorisme mensinyalir adanya lembaga pendidikan Islam tertentu (terutama yang nonformal, seperti pesantren) telah mengajarkan fundamentalisme dan radikalisme kepada para peserta didik.[9] Belakangan, sekolah-sekolah formal juga mulai mengajarkan elemen-elemen Islam radikal, misalnya mengajarkan kepada murid untuk tidak menghormati bendera Merah Putih saat upacara bendera.

Sejalan dengan menjamurnya ormas-ormas Islam pasca-reformasi, pendidikan (tarbiyah) dianggap pintu efektif bagi penyebaran dakwah Islam.[10] Kini, lahir ribuan pendidikan Islam terpadu (jenjang PAUD, TK hingga SLTA) yang didirikan oleh ormas-ormas Islam tertentu dari berbagai jenjang pendidikan. Ormas-ormas Islam itu memiliki ciri keagamaan tertentu yang "berbeda" dengan yang lain. Ciri-ciri keagamaan yang mereka anut, yaitu: (1) khas Islam Timur Tengah; (2) Leterlek dan harfiah dalam memahami Islam; (3) mengenalkan istilah-istilah baru yang bernuansa Arab, seperti *ḥalaqah, dawrah,* dan *mabit*.

Siswa/siswi sekolah menengah atas (SMA/SMK) digarap serius oleh ormas-ormas Islam yang bercirikan seperti di atas. Moment *dawrah, ḥalaqah,* dan *mabit* di satu sisi sangat positif dan membantu kerja guru agama untuk menanamkan akidah dan syariat Islam. Namun di sisi lain, model Islam yang diajarkan cenderung mendorong peserta didik untuk tidak toleran terhadap pihak lain.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) Jakarta sungguh mengejutkan. Penelitian yang dilakukan antara Oktober 2010 hingga 2011 terhadap guru PAI dan siswa (SMP dan SMA) di Jabodetabek menunjukkan bahwa 49 persen siswa setuju dengan aksi radikalisme demi agama.[11] Oleh karena itu, guru-guru PAI memiliki peran strategis

[9] Hilmy, "Radikalisme Agama dan Politik Demokrasi di Indonesia Pasca-Orde Baru."
[10] "Islamic Education."
[11] Hilmy, "Radikalisme Agama dan Politik Demokrasi di Indonesia Pasca-Orde Baru."

untuk menanamkan Islam moderat dan dapat menemukan cara yang tepat untuk menanggulangi (deradikalisasi) Islam radikal. Penelitian radikalisme Islam di sekolah umum ini sangat penting dilakukan karena beberapa alasan.

Pertama, kurikulum PAI beserta standar isi dan kompetensinya sangat dipengaruhi oleh kecenderungan paham yang diajarkan oleh para guru kepada para siswa. Oleh karenanya, guru dituntut dapat mengajarkan Islam dengan cara yang tidak mendorong peserta didik untuk menjadi radikal. *Kedua*, siswa/siswi SMA yang tidak memiliki *background* pendidikan agama (pesantren) sangat mudah terpengaruh oleh model-model Islam harfiah yang diajarkan oleh guru atau ustaz mereka.[12] Oleh karena itu, pihak sekolah dan guru agama perlu menjalin kerja sama dengan ormas-ormas Islam yang dikenal mengajarkan Islam moderat. Hal ini penting supaya anak didik memiliki wawasan yang luas tentang paham keislaman dari berbagai sumber. *Ketiga*, pihak sekolah dan guru perlu meningkatkan kemampuan untuk deteksi dini (*early warning*) peserta didik yang mulai "menyimpang" dari keumuman paham keislaman yang ada.[13] Siswa siswi yang mulai "sok alim", menyendiri atau eksklusif dengan kelompok sendiri, gampang mengharamkan dan mengafirkan, mengikuti pengajian berhari-hari tanpa izin, mengikuti pengajian yang di dalamnya ada baiat, fanatik, menyerang kelompok Islam lain, mulai berani kepada guru dan orangtua, memiliki cita-cita jihad dan mendirikan negara Islam, merupakan sebagian kecil tanda-tanda yang harus diwaspadai oleh guru-guru PAI. Dengan mengenali sumber radikalisme di sekolah, akan ditemukan upaya deradikalisasi dapat berjalan efektif manakala pihak sekolah dan guru PAI dapat memainkan peran positif dengan mengajarkan Islam moderat.[14]

IAIN Padangsidimpuan

[12] Rokhmad, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal."
[13] Hilmy, "Radikalisme Agama dan Politik Demokrasi di Indonesia Pasca-Orde Baru."
[14] Tamuri, Ismail, and Jasmi, "A New Approach in Islamic Education: Mosque Based Teaching and Learning."

6. Terorisme di Indonesia

Munculnya fenomena terorisme di Indonesia telah mengajak kita untuk mendiskusikan sebuah fenomena yang muncul dari pemberitaan media: "Islam radikal".[15] Pasca-pengeboman Kuningan, banyak pihak yang mencoba untuk mengaitkan pengeboman ini dengan kelompok yang diberi label "radikal" oleh media massa. Padahal, labelisasi "Islam radikal" ini sebenarnya masih sangat problematis dan perlu diperdebatkan.

Dengan adanya kelompok yang dinilai "radikal" atau "populis" meminjam istilah Vedi R. Hadiz yang dilabeli oleh media dan analis terorisme, apakah diskursus berhenti dengan menstigmatisasi kelompok Islam ini sebagai pelaku teror, tanpa memperhatikan diskursus historis yang menyebabkan kemunculan aksi teror itu sendiri? Apakah diskursus tidak lagi memperhatikan sebab-sebab lain yang sebenarnya lebih substansial daripada sekadar labelisasi?

Menjadi menarik bagi penulis untuk menganalisis keterlibatan fundamentalisme agama ketika Indonesia dihadapkan pada sebuah fenomena munculnya gerakan terorisme transnasional yang beberapa waktu lalu melakukan pengeboman di beberapa tempat. Dari pemberitaan media, penulis menangkap bahwa seakan-akan para pengebom Bali adalah mereka yang terdoktrinasi untuk menghalalkan segala cara dalam memenuhi tuntutan ideologis mereka.

Akhirnya, muncullah stereotip mengenai gerakan keagamaan yang "fundamentalis". Stereotip ini kian meluas tidak hanya pada aksi terorisme, tetapi juga pada aspek-aspek lain yang tak terkait aksi teror. Di beberapa tempat, orang-orang yang memiliki identitas keislaman kuat justru dicurigai sebagai "teroris" atau "fundamentalis" yang dianggap berbahaya.

Ketergesa-gesaan dalam generalisasi menyebabkan Barat tidak mampu memandang fenomena historis umat Islam secara objektif. Hal ini tidak berarti pembenaran terhadap praktik radikalisme yang dilakukan umat beragama, karena yang demikian bertentangan dengan pesan-pesan moral yang terkandung dalam

[15] Asrori, "Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas."

IAIN Padangsidimpuan

agama dan moralitas mana pun. Akan tetapi, apa yang perlu dilihat adalah bahwa Islam sebagai agama sangat menjunjung tinggi perdamaian. Hal ini bukan saja ada dalam normativitas teks wahyu dan Sunnah tetapi termanifestasi dalam sejarah Islam awal. Islam secara normatif dan historis (era Nabi) sama sekali tidak pernah mengajarkan praktik radikalisme sebagaimana terminologi Barat. Islam tidak memiliki keterkaitan dengan gerakan radikal, bahkan tidak ada pesan moral Islam yang menunjuk kepada ajaran radikalisme, baik dari sisi normatif maupun historis kenabian.

Radikalisme merupakan gerakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dirugikan oleh fenomena sosiopolitik dan sosiohistoris. Gejala praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam itu, secara historis-sosiologis, lebih tepat sebagai gejala sosial politik ketimbang gejala keagamaan meskipun dengan mengibarkan panji-panji keagamaan. Fenomena radikalisme yang dilakukan oleh sebagian kalangan umat Islam, oleh pers Barat dibesar-besarkan, sehingga menjadi wacana internasional dan terciptalah opini publik bahwa Islam itu mengerikan dan penuh dengan kekerasan. Akibatnya tidak jarang *image-image* negatif banyak dialamatkan kepada Islam sehingga umat Islam terpojokkan sebagai umat perlu dicurigai. Hal yang demikian terjadi karena masyarakat Barat mampu menguasai pers yang dijadikan instrumen yang kuat guna memproyeksikan kultur dominan dari peradaban global. Apa yang ditangkap masyarakat dunia adalah apa yang didefinisikan dalam media-media Barat. Label Islam untuk menyebut gerakan fundamentalis sangat menyenangkan bagi pers Barat ketimbang label Tamil di Sri Lanka, militan Hindu di India, IRA (kelompok bersenjata Irlandia Utara), militan Yahudi sayap kanan, sekte kebatinan di Jepang atau bahkan musuh lamanya, komunis-marxis yang tidak jarang menggunakan jalan kekerasan sebagai solusi penyelesaian masalah. Karena terlalu mengaitkan kata-kata radikalisme, fundamentalis, atau gerakan militan dengan Islam, sering kali media Barat mengabaikan perkembangan praktik kekerasan yang ditopang keyakinan keagamaan yang dilakukan oleh kalangan non-Islam ataupun yang ditopang oleh ideologi

IAIN Padangsidimpuan

"kiri". Contoh yang sangat jelas adalah aksi tutup mulut para elite politik Barat atau aksi bicara dalam kepura-puraan ketika melihat praktik kekerasan yang dilakukan oleh ekstremis Yahudi atau pun serdadu Israel atas orang-orang Arab Palestina. Apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pelaku kekerasan ini secara faktual sama dengan apa yang dilakukan oleh kelompok pelaku garis keras "radikalisme Islam". Tetapi sebutan radikalisme lebih kental ditujukan kepada gerakan Islam.[16]

Beberapa penulis yang dianggap "moderat", seperti Mujani[17] mencoba melacak akar genealogis dari Islam radikal dalam berbagai sudut pandang yang linear dengan teori Huntington di atas. Keberadaan Islam radikal bukan fenomena yang *genuine* lahir di Indonesia. Mereka kental dengan pengaruh-pengaruh eksternal dari Timur Tengah. Keberadaan gagasan "islamisme" yang mereka bawa pun tidak sepenuhnya mencerminkan keindonesiaan.

Sehingga, ada dua hal yang bisa kita baca sebagai penyebab radikalisme.[18] *Pertama*, warisan sejarah umat Islam yang konfliktual dengan rezim, karena ada modus-modus penindasan politik Islam yang terjadi pada beberapa fragmen sejarah, khususnya Orde Baru. Kelompok yang termarginalkan secara historis tersebut, dengan kesadaran sejarah, mencoba mengembalikan posisi politik Islam dengan jalan-jalan non-negara dan struktural. Dalam konteks global, adanya marginalisasi politik Islam oleh hegemoni dalam politik internasional (Amerika Serikat) menyebabkan adanya kesadaran untuk mengembalikan daulat politik Islam. Transnasionalisme membawa kesadaran tersebut ke Indonesia dalam bentuk gerakan-gerakan politik Islam.

Kedua, fenomena ekonomi-politik. Selain adanya penindasan politik, argumen kedua dari artikel ini adalah adanya penindasan ekonomi politik. Dengan argumen ini, radikalisme muncul karena ekses kapitalisme yang menciptakan mereka yang tak memiliki akses pada sumber-sumber modal. Dalam bahasa ekonomi poli-

[16] Turmudi and Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia.*
[17] "Islamic Philosophy of Education."
[18] Turmudi and Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia.*

IAIN Pekalongan

tik, pendekatan ini dikenal dengan "pendekatan kelas". Artinya, respons radikalisme pada dasarnya adalah respons kelas untuk melawan hegemoni kapital yang oligarkis dengan negara. Dengan demikian, radikalisme dibaca sebagai potret kesadaran sejarah yang berpadu dengan kesadaran kelas. Artikel ini akan mengelaborasi dua argumen tersebut sebagai alat untuk melacak akar radikalisme Islam di Indonesia.

Argumen pertama dari artikel ini adalah bahwa radikalisme Islam muncul sebagai respons sejarah. Ada beberapa penulis yang menyebut radikalisme Islam sebagai sebuah proses historis. Menurut Van Bruinesen,[19] kelahiran apa yang ia sebut sebagai "Islam radikal" dapat dilacak pada munculnya *Darul Islam* di beberapa kota dan partai politik Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) yang kerap membangun jaringan transnasional dengan beberapa gerakan di Timur Tengah. Gerakan yang dimaksud beragam, misalnya Wahabi di Arab Saudi dan *Ikhwanul Muslimin* di Mesir. Di kemudian hari muncul Hizbut-Tahrir dari Yordania. *Darul Islam* membangun fragmen kelompoknya dengan kekuatan militer. Beberapa pemberontakan lahir di Sulawesi Selatan (Kahar Muzakkar), Kalimantan Selatan (Ibnu Hajar), Jawa Barat (Kartosuwiryo), dan Aceh (Daud Beureueh). Dengan kekuatan ini, *Darul Islam* melancarkan pemberontakan kepada pemerintah RI secara terbuka, kendati kemudian dapat diberangus oleh rezim politik ketika itu. Adapun Masyumi membawa gagasan Islam dalam kerangka kenegaraan di parlemen dan berhasil menempati posisi kedua di Pemilu 1955.

Azra[20] juga menegaskan hal yang tidak jauh berbeda. Ia menyebutkan dua fenomena yang ia sebut sebagai *mainstream muslims* di satu sisi, dan kelompok radikal di sisi yang lain. Dua hal yang ia pandang bertentangan satu sama lain ini mewarnai Islam di Indonesia pascareformasi. Seperti logika Huntington yang sudah-sudah, ia juga melihat adanya benturan kepentingan di

[19] Syadli, "Konsep Pendidikan dalam Al-Qur'an."
[20] Azra, *Islamic Studies*.

IAIN Padangsidimpuan

antara dua kelompok ini. Azra (2006) melihat pentingnya memberdayakan kelompok moderat sebagai upaya menanggulangi kelompok radikal.

Pertanyaannya, apakah benturan antara kelompok "radikal" dan "moderat" ini yang melahirkan aksi teror di Indonesia? Persoalannya, dahulu, aktivitas terorisme ini justru dilakukan oleh Orde Baru. Azra, Mujani, atau Van Bruinesen boleh-boleh saja mengatakan bahwa radikalisme dibawa oleh gerakan Islam transnasional. Tetapi kita tak dapat melupakan bahwa jauh sebelum gerakan Islam masuk, Orde Baru telah terlebih dahulu mempraktikkan aksi teror kepada PKI, aktivis Islam, aktivis prodemokrasi, dan kelompok lain yang resisten terhadap rezim.[21]

Pada dasarnya, agama apa pun memiliki kecenderungan untuk melakukan *thruth claim* (mengklaim sebagai yang paling benar) karena agama merupakan nilai kepercayaan yang harus dipegang teguh oleh para pemeluknya. Sikap *thruth claim* tersebut akan bernilai positif apabila hanya diorientasikan ke dalam (*intrinsic orientation*) dalam penghayatan dan aplikasinya, bukan untuk ke luar dirinya (*extrinsic orientation*) yang menyebabkan prasangka negatif dan konflik. Agama intrinsik memenuhi seluruh hidup dengan motivasi dan makna, sedang agama ekstrinsik menjadikan agama diperbudak untuk mendukung dan membenarkan kepentingan pribadi.

Memaksakan munculnya pemahaman yang sama terhadap ajaran agama sama halnya dengan meniadakan agama itu sendiri karena sikap tersebut akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Masing-masing pemeluk agama akan menafikan kebenaran agama yang dianut oleh orang lain dan hal ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Dalam sejarah telah terbukti bahwa sikap eksklusif memunculkan pertentangan atau bahkan peperangan antar-umat beragama.

Sikap eksklusif tersebut melahirkan radikalisme dalam beragama, dan lagi-lagi Islamlah yang mendapat tudingan sebagai

[21] Turmudi and Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia.*

IAIN Pedangsidimpuan

biang pencetus segala aksi kekerasan di berbagai belahan dunia. Di satu sisi mungkin pendapat ini bisa dianggap benar, karena sebagian besar tindakan terorisme tersebut dilakukan oleh orang (yang mengaku) Islam. Mereka berasumsi bahwa sikap tersebut adalah manifestasi jihad dan balasannya adalah surga. Namun di sisi lain, mereka tidak menyadari bahwa tindakan tersebut adalah dampak dari pemahaman yang parsial terhadap teks keagamaan sehingga diaplikasikan dalam tindakan yang jauh dari makna kontekstual yang diharapkan.[22]

Radikalisme dalam agama ibarat pisau bermata dua, di satu sisi, makna positif dari radikalisme adalah spirit menuju perubahan ke arah lebih baik yang lazim disebut *ishlah* (perbaikan) atau *tajdid* (pembaruan). Dengan begitu radikalisme bukan sinonim ektremitas atau kekerasan, ia akan sangat bermakna apabila dijalankan melalui pemahaman agama yang menyeluruh dan diaplikasikan untuk ranah pribadi. Namun di sisi lain, radikalisme akan menjadi berbahaya jika sampai pada tataran *ghuluw* (melampaui batas) dan *ifrath* (keterlaluan) ketika dipaksakan pada pemeluk agama lain.[23]

Radikalisme berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti "akar". Ia merupakan paham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai kemajuan. Dalam perspektif ilmu sosial, radikalisme erat kaitannya dengan sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap *status quo* dengan jalan menghancurkan *status quo* secara total, dan menggantinya dengan sesuatu yang baru yang sama sekali berbeda. Radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga, atau nilai-nilai yang dapat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keadaan yang ditolak.

Secara sederhana, radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal yang sekaligus menjadi karakteristik-

[22] Nordås and Gleditsch, "Climate Change and Conflict."
[23] Aziz and Baru, "Implementasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi."

IAIN Padangsidimpuan

nya, yaitu: *pertama*, sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. *Kedua*, sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. *Ketiga*, sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan orang kebanyakan. *Keempat*, sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan.[24]

Dampak paling nyata dari terjadinya radikalisme adalah terbentuknya politisasi di dalam agama, di mana agama memang sangat sensitif sifatnya, paling mudah membakar fanatisme, menjadi kipas paling kencang untuk melakukan berbagai tindakan yang sangat keras, baik di dalam kehidupan sosial antar-individu maupun kelompok, sehingga terbentuklah apa yang dinamakan kelompok Islam radikal.

Sejarah perilaku kekerasan dalam Islam, umumnya terjadi berkaitan dengan persoalan politik, yang kemudian berdampak kepada agama sebagai simbol. Hal ini adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Walaupun pembunuhan terhadap khalifah telah terjadi ketika Khalifah Umar berkuasa. Namun gerakan radikalisme yang sistematis dan terorganisasi baru dimulai setelah terjadinya Perang Shifn di masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Hal ini ditandai dengan munculnya sebuah gerakan teologis radikal yang disebut dengan "*Khawarij*". Secara etimologis, kata *khawarij* berasal dari bahasa Arab, yaitu "*kharaja*" yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Dari pengertian ini, kata tersebut dapat juga dimaknai sebagai golongan orang Islam atau Muslim yang keuar dari kesatuan umat Islam. Ada pula yang mengatakan bahwa pemberian nama itu didasarkan pada QS. *an-Nisa'* [4]: 100 Surah an-Nisa (4) ayat 100, yang menyakatan: "*Keluar dari rumah kepada Allah dan Rasulnya.*" Dengan kata lain, golongan "Khawarij" memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah atau kampung halaman untuk "berhijrah" dan mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya.

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

[24] Snow and Cross, "Radicalism within the Context of Social Movements: Processes and Types."

Dalam konteks teologi Islam, Khawarij berpedoman kepada kelompok atau aliran kalam yang berasal dari pengikut Ali bin Abi Thalib yang kemudian keluar dari barisannya, karena ketidaksetujuannya terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase (tahkim) ataupun perjanjian damai dengan kelompok pemberontak Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengenai persengketaan kekuasaan (khilafah). Menurut kelompok Khawarij, keputusan yang diambil Ali adalah sikap yang salah dan hanya menguntungkan kelompok pemberontak. Situasi inilah yang melatarbelakangi sebagian barisan tentara Ali keluar meninggalkan barisannya.[25]

Arbitrase terjadi dalam konteks Perang Shifn, antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Mu'awiyah bin Abi Sufyan sebagai hasil dari pertikaian politik pasca-kematian Khalifah Usman bin Affan. Sebagaimana di dalam sejarah, ketika Ali terpilih menjadi khalifah, ia mendapatkan tantangan dari beberapa pemuka sahabat yang ingin menjadi khalifah, di antaranya Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Gubernur Damaskus waktu itu.[26] Mu'awiyah tidak mengakui Ali sebagai khalifah, sebagaimana juga Talhah dan Zubair. Mereka menuntut kepada Ali, agar menghukum pembunuh Khalifah Usman bin Affan, bahkan mereka menuduh Ali bin Abi Thalib turut terlibat dalam pembunuhan itu. Salah seorang pemuka pemberontak dari Mesir yang datang ke Madinah, dan kemudian membunuh Usman bin Affan, adalah Muhammad Ibn Abi Bakr, anak angkat dari Ali bin Abi Thalib. Selain itu, Ali tidak mengambil tindakan keras terhadap pemberontak, bahkan Muhammad Ibn Abi Bakr ditunjuk dan diangkat menjadi Gubernur Mesir.

Agama bukanlah menjadi faktor utama (*core conflict*) dalam konflik anarkisme, namun hanya menjadi faktor konsiderans maupun pendukung (*supporting conflict*). Dalam berbagai kasus konflik mengatasnamakan agama seperti konflik Islam-Kristen di Poso maupun Maluku, agama justru terpolitisasi menjadi identitas konflik yang sebenarnya hanya menjadi topeng atas rivalitas pere-

[25] Morton Deutsch, Peter T. Coleman, "The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice."

[26] Potrafke, "Islam and Democracy."

IAIN Padangsidimpuan

butan sumber ekonomi, politik maupun birokrasi antar masyarakat. Tereskalasinya agama menjadi bagian sirkuler konflik anarkis merupakan implikasi panjang dari kebijakan kerukunan beragama yang tidak afirmatif. Dalam berbagai hal, ada proses diskrimasi dan pengistimewaan terhadap kelompok tertentu yang kemudian menimbulkan potensi konflik laten. Sebenarnya membincangkan masalah konflik di ranah lokal bermuara pada marginalisasi dan ketertindasan sehingga agama kemudian menjadi stimulus dalam melakukan konflik.[27]

7. Resolusi Konflik

Negara sendiri rupanya juga menerapkan standar ganda dalam menyelesaikan konflik yakni menerapkan strategi pluralis-humanis di satu sisi, sementara di sisi lain juga menerapkan strategi penyelesaian birokratis-strukturalis. Ambiguitas yang diperlihatkan negara dalam penyelesaian konflik anarkisme agama tidaklah secara benar dan utuh menyelsaikan sampai ke akarnya yakni marginalisasi dan dikriminasi. Namun justru pendekatan represif dan "pemolisianisasi" terhadap minoritas yang dilabel sebagai "biang permasalahan".[28] Padahal, konflik yang terjadi selama ini adalah faktor ketidaksukaan atas capaian ekonomi politik kelompok tertentu sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Maka pada akhirnya, negara hanya menuruti suara mayoritas sebagai aktor perusak dan mengerdilkan suara minoritas sebagai korban. Artinya negara masih setengah hati dalam penyelesaian konflik anarkisme agama dan hanya memandangnya sebagai konflik yang disebabkan perbedaan mahzab teologis tertentu yang kemudian dianggap sesat. Pola sesat pikir inilah yang kemudian menyebabkan anarkisme agama selalu berlanjut dari hari ke hari dan negara membiarkan hal tersebut sebagai masalah intern umat.

Konflik merupakan salah satu hal yang paling dihindari bagi setiap orang yang menginginkan kedamaian. Namun pada

[27] Ratnieks, Foster, and Wenseleers, "Conflict Resolution in Insect Societies."

[28] Morton Deutsch, Peter T. Coleman, "The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice."

UIN Raden Intan Lampung

kenyataannya konflik tidak bisa dihindari dalam bermasyarakat.[29] Konflik terjadi ketika terjadi kesenjangan antara keadaan ideal dan kenyataan yang terjadi. Setiap sistem kehidupan masyarakat pasti pernah mengalami konflik, namun yang membedakan adalah tingkat kuantitas dan dampak dari konflik-konflik tersebut.[30] Konflik-konflik terjadi melalui beberapa faktor, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, dan lain-lain.[31] Dari berbagai faktor yang ada, faktor agama merupakan salah satu faktor yang sangat sensitif sebagai penyebab terjadinya konflik.[32]

Radikalisme dalam agama ibarat pisau bermata dua, di satu sisi, makna positif dari radikalisme adalah spirit menuju perubahan ke arah lebih baik yang lazim disebut *ishlah* (perbaikan) atau *tajdid* (pembaruan). Dengan begitu, radikalisme bukan sinonim ekstremitas atau kekerasan, ia akan sangat bermakna apabila dijalankan melalui pemahaman agama yang menyeluruh dan diaplikasikan untuk ranah pribadi. Namun di sisi lain, radikalisme akan menjadi berbahaya jika sampai pada tataran *ghuluw* (melampaui batas) dan *ifrath* (keterlaluan) ketika dipaksakan pada pemeluk agama lain.[33]

Kelompok Islam radikal memahami Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap, serta memberikan perhatian kepada autentisitas kultural. Islam bukanlah agama dalam pengertian Barat, tetapi Islam adalah cara hidup yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Pemahaman ini membentuk pandangan hidup yang senantiasa merindukan pemberlakuan aspek-aspek keislaman di setiap sendi kehidupan, tidak hanya dalam aspek ritual ibadah semata. Hal ini pun berdampak pada pembentukan identitas yang eksklusif sebagai kriteria khusus

[29] Nordås and Gleditsch, "Climate Change and Conflict."

[30] Jehn and Mannix, "The Dynamic Nature of Conflict: A Longitudinal Study of Intragroup Conflict and Group Performance."

[31] Habib, *Konflik Antar Etnik di Pedesaan*; Wirahadi Ahmad and Septriani, "Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis dan Cara Menguranginya."

[32] Yunus, "Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya."

[33] Willis and Aronowitz, "Radical Feminism and Feminist Radicalism."

golongan ini.[34]

Kriteria Islam radikal, antara lain: *pertama*, mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung; *kedua*, dalam kegiatannya mereka sering kali menggunakan aksi-aksi yang keras, bahkan tidak menutup kemungkinan kasar terhadap kegiatan kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka; *ketiga*, secara sosiokultural dan sosioreligius, kelompok radikal mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan diri dan ritual yang khas; *keempat*, kelompok Islam radikal sering kali bergerak secara bergerilya, walaupun banyak juga yang bergerak secara terang-terangan.[35]

Kota Sibolga merupakan salah satu Kota di daerah Tapanuli dengan jumlah penduduk muslim dan non-Muslim yang hampir seimbang. Menariknya, Kota Sibolga merupakan daerah dengan konflik agama yang rendah. Namun pada bulan Maret 2019 yang lalu seluruh publik kaget dengan kejadian ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Kota Sibolga. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun upaya pengurangan konflik telah dilakukan selama ini namun ketika upaya itu memiliki celah, maka akan mudah untuk dihancurkan.

Kejadian ledakan di Kota Sibolga disebut sebagai salah satu dampak dari paham radikalisme yang sudah menemukan celah di kota tersebut. Paham radikalisme telah menyusup ke Kota Sibolga yang selama ini aman dan damai. Paham radikalisme bisa perlahan-lahan masuk melalui elemen-elemen masyarakat, misalnya sekolah[36] dan melalui interaksi sosial dengan para pendatang.[37] Kejadian tersebut seolah menjadi pengingat bahwa setiap elemen masyarakat harus waspada dan bekerja sama dalam meminimalisasi konflik dan menolak paham radikalisme untuk masuk ke dalam lingkungan masyarakat.

IAIN Padangsidimpuan

[34] Yusoff, "Islamic Radicalism in Malaysia: An Overview."
[35] Rokhmad, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal."
[36] Munip, "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah."
[37] Asrori, "Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas."

Kerja sama yang dibentuk oleh berbagai elemen masyarakat akan menjadi suatu resolusi terhadap konflik-konflik yang terjadi.[38] Upaya seluruh elemen dalam mencari solusi terhadap konflik yang terjadi merupakan bentuk kepedulian dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan yang ditempati.[39] Dengan resolusi konflik yang ditemukan, maka masyarakat akan semakin bijak dalam mempersiapkan sebelum konflik muncul, menghadapi saat konflik terjadi, dan mempertahankan kedamaian yang telah dicapai di lingkungan masyarakat.

Kasus konflik Islam dan Kristen di Tapanuli sebenarnya tidak lepas dari rancang bangun skenario tersebut di mana rivalitas dalam perebutan jabatan publik kemudian tereskalasi menjadi konflik agama. Puncak konflik Maluku sendiri terjadi dalam kurun waktu 1999-2002 yang dimulai dari peristiwa Maluku Berdarah pada 19 Januari 1999 yang memakan banyak korban. Konflik sendiri sudah diselesaikan melalui Perjanjian Malino I dan II pada 2002-2003 yang diwakili tokoh-tokoh masyarakat, baik Islam maupun Kristen. Namun demikian, yang menjadi kekhasan dalam resolusi penyelesaian konflik anarkisme agama di Maluku adalah representasi maupun revitalisasi kearifan lokal berupa *pela gandong* antarnegeri (kampung) di Maluku untuk saling mengangkat saudara menjadi hubungan kakak adik.

Kedua resolusi konflik inilah yang coba untuk diangkat dalam tulisan ini dengan rumusan masalah yakni seberapa besar peran representasi dan revitalisasi kearifan lokal sebagai resolusi konflik anarkisme agama di Maluku. Pengutukan dan perlawanan secara membabi buta terhadap kekuatan-kekuatan baru dalam agama sebagaimana terjadi kepada ISIS akan semakin menyuburkan gerakan-gerakan baru dalam agama, dan ini tidak akan pernah selesai apabila tidak ada upaya mencari jalan tengah untuk mendamaikan berbagai konflik tersebut. Karena semua orang atau

[38] Morton Deutsch, Peter T. Coleman, "The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice."

[39] Boulton, "Contemporary Conflict Resolution"; Humphreys, "Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution."

kelompok akan berupaya menafsirkan kembali ajaran agama menurut pemahamannya masing-masing.[40] Dampak terburuk dari konflik-konflik tersebut adalah hilangnya rasa toleran dalam antar-beragama.[41] Harus disadari bahwa agama pada level eksoteris (syariat) memang berbeda, tetapi pada level esoteris (budaya) semuanya sama saja. Semua agama kemudian dipandang sebagai jalan yang sama-sama sah untuk menuju kepada Tuhan yang satu.[42] Realitas menunjukkan bahwa ketegangan yang terjadi di antara umat beragama justru berkaitan erat dengan faktor-faktor yang berada di luar lingkup agama itu sendiri. Karena agama sifatnya sensitif, maka semua orang bersandar dengan mengatasnamakan agama.[43] Itulah problem yang sangat pelik dihadapi oleh berbagai agama.

Kecenderungan terjadinya konflik, perang dan terorisme tidak saja disebabkan oleh agama, tetapi oleh masalah sosioekonomi, politik di antara kelompok agama.[44] Sejauh konflik dibenarkan dengan alasan religius, orang yang bersangkutan itu sebenarnya justru tidak setia pada iman dan agamanya. Agama diperalat, nama Tuhan dihinakan oleh egoisme dan kesombongan kolektif.[45] Fenomena demikian sebenarnya bukan lagi atas nama agama, karena agama pada esensialnya yaitu sikap menyembah, tunduk, dan rendah hati pada yang transenden.

Sikap yang militan disebabkan oleh materialisme dan sekularisme yang menawarkan bahwa Tuhan tidak ada, tidak hadir dan tidak dibutuhkan.[46] Rasionalisme menyingkirkan agama ke pinggiran hidup dengan menyebutnya sebagai sikap kekanak-kanakan, takhayul, ilusi. Apa yang tidak bisa dimengerti oleh otak manusia berarti tidak ada. Atas nama kebebasan agama, toleransi

IAIN Padangsidimpuan

[40] Turmudi and Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia.*
[41] Al Qurtuby, "The Islamic Roots of Liberation, Justice, and Peace: An Anthropocentric Analysis of the Concept of & Quot;Tawhīd & Quot;"
[42] "Islamic Philosophy of Education."
[43] Arif, *Pendidikan Islam Transformatif.*
[44] Perrow, "Conservative Radicalism."
[45] Springer, Regens, and Edger, *Islam. Radicalism Glob. Jihad.*
[46] Willis and Aronowitz, "Radical Feminism and Feminist Radicalism."

dan pluralisme, agama dilarang masuk dalam *public sphare*, dibatasi pada kepercayaan pribadi.[47] Materialisme-kapitalisme menang atas materialisme komunis karena lebih bijaksana terhadap agama dan kebebasan pribadi. Biar saja orang percaya dan beribadat kalau mau. Tidak ada pengaruhnya, semua akhirnya memuja uang. Agama bisa dijadikan pendukung budaya dominan tanpa memakai paksaan. Akhirnya orang-orang yang peka akan nilai-nilai agama merasa tertindas dan berjuang agar nilai-nilai religius dan moral diperhatikan lagi, maka lahirlah reaksi ekstremis.[48] Tetapi pemaksaan melahirkan fundamentalisme, penganiayaan terhadap agama menciptakan sikap radikal bagi orang tertindas sehingga rela mati bagi agamanya dan melawan dengan kekerasan.

Kebutuhan akan menghidupkan ruang diskursif maupun dialogis antar-umat beragama juga muncul. Adalah multikulturalisme dan pluralitas agama sebagai bagian dari post-materialisme tersebut yang sekiranya menjadi patron konsepsi dalam membidangi kearifan lokal untuk direvitalisasi di tengah iklim konflik yang bisa meletus setiap saat. Adapun studi awal yang mencoba untuk menganalisis mengenai relasi kearifan lokal dengan resolusi konflik agama dilakukan oleh John Haba. Haba dalam studinya yang berjudul "Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso" melihat lima peran vital kearifan lokal sebagai media resolusi konflik keagamaan.[49] Pertama, kearifan lokal sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Identitas tersebut menunjukkan bahwa komunitas tersebut memiliki budaya perdamaian yang berarti menunjukkan komunitas tersebut merupakan komunitas yang beradab. Hal ini dikarenakan konflik merupakan simbolisasi kultur barbarian. Tentunya dengan memiliki kearifan lokal, komunitas tersebut ingin mencitrakan dirinya sebagai komunitas yang cinta damai.

Kedua, kearifan lokal sendiri menyediakan adanya aspek

[47] Hobson, "Religion and Spirituality."

[48] Creed, "Voice Lessons: Tempered Radicalism and the Use of Voice and Silence*."

[49] Haba, "Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso."

IAIN Padangsidimpuan

kohesif berupa elemen perekat lintas agama, lintas warga, dan kepercayaan. Dalam konteks ini, kearifan lokal dapat diartikan sebagai ruang maupun arena dialogis untuk melunturkan segala jenis esklusivitas politik identitas yang melekat di antara berbagai kelompok. Adanya upaya menjembatani berbagai lintas kepentingan tersebut merupakan upaya untuk membangun inklusivitas dalam meredam potensi konflik yang lebih besar lagi. *Ketiga*, berbeda halnya dengan penerapan hukum positif sebagai media resolusi konflik yang selama ini jamak dilakukan oleh para penegak hukum kita yang kesannya "memaksa". Hal inilah yang menjadikan reoslusi konflik dengan hukum positif sendiri justru sifatnya artifisal dan temporer meskipun memiliki kekuatan hukum tetap.[50] Banyak di antara kasus anarkisme agama yang diselesaikan melalui pendekatan hukum positif seperti halnya SKB Tiga Menteri justu banyak dilanggar. Kearifan lokal sebagai bagian dari resolusi konflik alternatif justru lebih ke arah mengajak semua pihak untuk berunding dengan memanfaatkan kedekatan emosi maupun kultural.[51]

Keempat, kearifan lokal memberi warna kebersamaan bagi sebuah komunitas dan dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi, sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama menepis berbagai kemungkinan yang dapat meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal, yang dipercaya berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas yang terintegrasi. *Kelima*, kearifan lokal akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkan di atas kebudayaan yang dimiliki. Maka, bisa dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan bentuk sintesis dari unsur sosiokultural dan sosio-keagamaan yang tujuannya adalah merekatkan kembali hubungan antar-sesama masyarakat yang tereduksi perebutan kepentingan politik maupun ekonomi.[52]

Studi John Haba mengenai kearifan lokal sebagai resolusi

[50] Yunus, "Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya."
[51] Geertz, "Religion as A Cultural System."
[52] Liliweri, *Prasangka Dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*.

IAIN Padangsidimpuan

konflik dalam mengatasi konflik anarkisme agama setidaknya telah memberikan inspirasi kepada akademisi lainnya untuk mengkaji pada hal serupa. Kearifan lokal kembali menjadi kajian alternatif dalam upaya bina damai dalam mengatasi konflik komunal dalam masyarakat heterogen. Rupanya di tengah ancaman laten konflik antar-agama maupun antar-etnik di Indonesia, ragam kearifan lokal sebagai budaya perdamaian juga turut eksis dalam menjaga solidaritas dan harmoni antarlintas masyarakat. Mereka berperan dalam manajemen konflik, baik dalam upaya pencegahan maupun upaya resolusi konflik.

Adapun studi yang dilakukan oleh Hamzah Tualeka yang berjudul "Konflik dan Integrasi Sosial Bernuansa Agama di Ambon Lease" menyebutkan signifikansinya *pela gandong* sebagai resolusi konflik di Maluku.[53] Adapun konflik Islam-Kristen yang tereskalasi dalam peristiwa Idul Fitri Berdarah pada 19 Januari 1999 dipicu karena enam faktor, yakni: *pertama*, latar belakang sejarah, penduduk dan agama, tentang sekilas sejarah Maluku, pertemuan agama Islam dan Kristen di Maluku, penduduk dan agama di Maluku, Maluku daerah rawan konflik. *Kedua*, kondisi sosiologis yang melatarbelakangi konflik, tentang kondisi sosiologis, umat Kristen merasa terancam, dalang kerusuhan, dan intelijen asing masuk Tapanuli. *Ketiga*, peristiwa kerusuhan Ambon-Maluku, tentang menjelang peristiwa kerusuhan, kerusuhan Ambon-Maluku, fase-fase konflik Ambon, dan korban konflik Ambon-Maluku. Selain itu pula, konflik juga dipicu adanya segregaasi sosio-keagamaan yang terjadi antara kaum Islam dan Kristen di Maluku, peran dari lembaga-lembaga keagamaan yang sebenarnya lebih berurusan dengan politik daripada mengurus umatnya sendiri. Kemudian yang ketiga, pola kepemimpinan lokal sudah hancur sama sekali, karena pola rekrutmen pemimpin zaman Orde Baru itu sangat menggantung ke atas, sehingga tidak ada pemimpin-pemimpin lokal yang datang dari bawah.

[53] Uzuntiryaki and Geban, "Effect of Conceptual Change Approach Accompanied with Concept Mapping on Understanding of Solution Concepts."

IAIN Padangsidimpuan

Adapun indikator-indikator tersebut tereskalasi menjadi konflik yang besar pada tahun 2002 yang menewaskan banyak korban dari pihak Islam maupun Kristen. Ditengarai bahwa konflik agama Maluku sendiri dipolitisasi demi berbagai kepentingan kelompok seperti halnya Republik Maluku Seruni (RMS). Konflik Maluku sejatinya sudah dapat diselesaikan melalui Perjanjian Malino I dan II pada tahun 2004 dalam tingkat formal. Namun sejatinya, yang berperan besar dalam merajut kembali benang-benang perdamaian antar-agama Islam maupun Kristen adalah *pela gandong* yakni suatu kearifan lokal perdamaian yang terdapat dalam masyarakat lokal Maluku.

Pela sendiri diartikan sebagai suatu sistem hubungan sosial yang dikenal dalam masyarakat Maluku berupa suatu perjanjian hubungan antara satu negeri (kampung) dan kampung lainnya yang biasanya berada di pulau lain dan kadang juga menganut agama lain di Maluku. Adapun perjanjian tersebut biasanya dilakukan dalam bentuk upacara minum tuak yang dicampur darah kedua pemimpin negeri (desa). Hal tersebut menandakan adanya hubungan *pela* antara kedua negeri dan mengikat keturunannya sepanjang masa. *Pela gandong* juga disimbolisasikan sebagai hubungan adik kakak antarkedua negeri tersebut.

Dalam analisis terhadap konflik Maluku, disebutkan bahwa revitalisasi *pela gandong* sendiri menjadi penting dalam membangun solidaritas antarnegeri yang dikoyak konflik horizontal; misalnya saja, Kampung Oma Pela Gandong dengan Ulath dan Buano, Negeri Ema Huaressy Pela dengan Ameth dan Negeri Naku, Negeri Naku Gandong dengan Larike, Negeri Ema Huaressy Gandong dengan Batu Merah, dan Batu Merah Pela dengan Passo. Intinya Hamzah ingin mengatakan bahwa *pela gandong* memegang kunci utama dalam mendamaikan konflik agama dalam tingkatan informal maupun sosio-keagamaan.

Studi serupa juga dilakukan oleh Wayan Rai dalam risalahnya yang berjudul "Manajemen Konflik Sosial di Bali".[54] Sama seperti

[54] Habib, *Konflik Antar Etnik di Pedesaan.*

halnya kekerasan agama maupun etnik di Maluku, konflik di Bali sendiri juga muncul ketika akhir rezim ototritarian mulai runtuh pada medio 1997-2001 dan juga dilakukan pada saat hari besar agama yakni Hari Raya Nyepi. Saat itu, konflik terjadi dikarenakan lebih banyak berbentuk perkelahian massal disertai kekerasan. Akar masalah yang memicu terjadinya konflik sosial antarwarga, baik internal desa maupun antardesa yaitu dendam pribadi/kelompok, sengketa tanah milik/*pelaba pura, ayahan desa, wangsa*, kuburan, batas wilayah desa adat, politik, perkelahian antar-pemuda, dan lain sebaginya.

Mekanisme konflik keagamaan baik antar-sesama Hindu maupun lintas agama sebenarnya dapat diselesaikan melalui desa-desa pakraman dengan menggunakan strategi mediasi dalam menanggulangi dan mencegah konflik seperti halnya kearifan lokal berupa konsep *tri hita karana*; semboyan desa *kala-patra*, *linggih manut sasana, sasana manut linggih*; juga doktrin swa darma. Akan tetapi juga negosiasi. Jika suatu konflik tidak bisa diselesaikan lewat negosiasi atau musyawarah, terutama konflik berdimensi internal yang melibatkan warga melawan desa pakraman.

Satu hal yang pasti dalam membicarakan kehidupan multikulturalisme dalam beragama di Bali adalah semangat kekeluargaan. Semangat berkeluarga atau yang lebih dikenal sebagai *menyama braya* sendiri merupakan bentuk tenggang raya maupun toleransi orang Bali terhadap pendatang yang bermukim di sana. Konteks "menjadi keluarga" sendiri mengindikasikan adanya persaudaraan lintas darah orang Bali terhadap pendatang, karena sejatinya sendiri orang Bali juga merupakan keturunan pendatang dari Majapahit. Konsep ini pulalah yang mengindarkan Bali dari konflik agama maupun etnis pada tahun 1999 ketika di Tanah Air marak terjadi konflik Islam Tiong Hoa maupun Islam dan minoritas lainnya.

Konteks "menjadi keluarga" dalam kearifan lokal juga terjadi dalam kasus resolusi konflik keagamaan di Tapanuli. Tapanuli yang memiliki semboyan *Dalihan Na Tolu* sendiri dimaknai secara harfiah sebagai kawasan dengan kekerabatan yang kuat. Kondisi heterogenitas yang terjadi dalam kasus Lampung terjadi karena

LAN Badan Litbang

progam transmigrasi yang digalakkan oleh pemerintah Orde Baru pada dekade 1980-an di mana transmigran dari Bali, Jawa, Bugis, maupun kawasan padat penduduk lainnya untuk pindah ke Lampung menjadi pekebun maupun petani. Proses asimiliasi di Lampung sebenarnya berjalan baik karena orang Lampung sendiri sebenarnya terbuka atas kehadiran pendatang melalui sifat budayanya yakni *nemui nyimah* (keramahtamahan). Hal inilah yang kemudian membuat identitas kelampungan sendiri menjadi bias karena sekat-sekat etnisitas dan keagamaan sendiri sudah kabur dan tercampur aduk dengan etnis maupun agama lainnya.

Munculnya isu-isu politis mengenai radikalisme Islam merupakan tantangan baru bagi umat Islam untuk menjawabnya. Isu radikalisme Islam ini sebenarnya sudah lama mencuat di permukaan wacana internasional. Radikalisme Islam sebagai fenomena historis-sosiologis merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam wacana politik dan peradaban global akibat kekuatan media yang memiliki potensi besar dalam menciptakan persepsi masyarakat dunia.[55] Banyak label yang diberikan oleh kalangan Eropa Barat dan Amerika Serikat untuk menyebut gerakan Islam radikal ini, mulai dari sebutan kelompok garis keras, ekstremis, militan, Islam kanan, fundamentalisme, sampai terorisme. Bahkan negara-negara Barat pascahancurnya ideologi komunisme (pasca-Perang Dingin) memandang Islam sebagai sebuah gerakan peradaban yang menakutkan.

Maka dengan semakin heterogenitasnya etnis maupun agama di Indonesia tidak membuat kawasan tersebut secara utuh sendiri lepas dari konflik. Konflik agama maupun etnis yang terjadi di kawasan Indonesia agak sedikit berbeda dengan daerah lainnya yang mayoritas dihasilkan karena adanya diskriminasi maupun etnifikasi terhadap etnis maupun agama tertentu. Konflik yang terjadi di Indonesia lebih banyak terjadi karena penonjolan identitas maupun pengeksklusifikasi terhadap etnis maupun agama

[55] Borum, "Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories."

INN Pedamaian Lampung

tertentu.[56] Misal konflik yang terjadi pada November 2012 di Lampung Selatan yang terjadi antara etnis Islam Lampung dan etnis Hindu Bali lebih dikarenakan masalah komunikasi dan sikap esklusivitas Hindu Bali yang tidak mau membaur dengan pihak lainnya sehingga memunculkan sikap arogansi terhadap etnis Lampung. Maka dari situlah, kemudian konflik pecah karena pemicu sederhana, namun proses inkubasi potensi konflik sendiri sudah berlangsung sudah lama.

Sama seperti halnya yang terjadi dalam resolusi konflik agama Islam dan Kristen di Maluku melalui proses kearifan lokal *pela gandong* (hubungan adik kakak). Adapun resolusi konflik yang digunakan untuk menghentikan konflik Bali dan Lampung adalah dengan cara-cara kultural pula. Dalam adat *ulun* Lampung sendiri, dikenal sebagai *angkon mewaghi* (angkat saudara). Orang Lampung sebagai saudara tua "mengangkat saudara" agama maupun etnis lainnya menjadi saudara, meskipun tidak sedarah. Prosesi ini biasanya dilakukan untuk penyambutan atau penyelesaian maupun konflik atau sengketa permasalahan tertentu.

Pada dasarnya, konflik di lingkungan masyarakat merupakan sesuatu yang alamiah, namun terkadang menjadi rumit karena penyelesaian atau penanganannya tidak dilakukan secara terarah.[57] Sering sekali pemecahan sebuah konflik dilakukan dengan menggunakan kekuasaan atau kekerasan antarpihak yang berkonflik.[58] Padahal, ada pendekatan yang disebut dengan resolusi konflik untuk menyelesaikannya. Pendekatan resolusi konflik merupakan penggunaan cara-cara yang demokratis dan konstruktif dalam menyelesaikan konflik. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka sendiri dengan melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ditunjuk karena dinilai lebih netral, bijaksana, dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik. Apa pun strategi atau proses yang

[56] Habib, *Konflik Antar Etnik di Pedesaan.*

[57] Liliweri, *Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur.*

[58] Wirahadi Ahmad and Septriani, "Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis dan Cara Menguranginya."

digunakan, resolusi konflik berupaya untuk menyelesaikan konflik melalui sarana tanpa kekerasan.

Penyelesaian konflik tidak bisa terpisahkan dari rekonsiliasi, karena rekonsiliasi merupakan salah satu tahap resolusi konflik yaitu proses *peace building*. Rekonsiliasi merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik.[59] Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. Terakhir, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng. Menurut Ralf Dahrendrof penyelesaian konflik yang efektif sangat bergantung pada tiga faktor. *Pertama*, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik di antara mereka. *Kedua*, kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasi sehingga masing-masing pihak memahami tuntutan pihak lain. *Ketiga*, kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dalam hubungan interaksi di antara mereka.

Bangunan sosial dan kultural komunitas di Ambon pada umumnya merupakan contoh empiris yang paling aktual dari aksi kolektif yang berkelanjutan dalam kaitannya dengan membangun basis penghidupan hubungan kekerabatan. Dalam pelaksanaan secara lokal telah membentuk suatu sistem kekeluargaan untuk mempererat persatuan antarkomunitas di Ambon. Pranata-pranata dan organisasi lahir dari sejarah sosial dan budaya serta politik antardesa atau antar-kekerabatan telah menjadi panduan dan hukum adat yang mampu menjamin ketertiban hubungan sosial di antara anggota masyarakat. Tatanan dan pranata adat inilah yang menjadi benteng pertahanan bagi penghidupan hubungan

[59] Yunus, "Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya."

UIN Pascasarjana

persaudaraan dari masyarakat lokal di Ambon. Norma-norma yang membatasi pilihan-pilihan dari individu egoistis yang hanya berusaha memaksimalkan kepentingannya sendiri, dan juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk preferensi-preferensi individu. Norma sosial memiliki akibat positif, yakni membantu merangkai harapan-harapan individu dan memperkuat rasa saling percaya. Ada konsep kunci utama dari berbagai macam tatanan adat dan sosial yang mendasari hubungan persaudaraan di Ambon. Konsep itu dikenal dengan *pela gandong*. *Pela gandong* merupakan suatu relasi hubungan darah dan perjanjian antara satu negeri dan negeri lain baik yang terjalin antara negeri-negeri sedaratan dan berlainan pulau, maupun antara etnis dan agama yang berbeda. Hubungan *pela gandong* ini mempunyai efek yang sangat penting di mana semua masyarakat turut serta menjunjung kebersamaan dan menjaga hubungan tersebut.

Pela gandong mengandung arti hubungan kekerabatan meski berbeda agama. Dapat pula diartikan hidup berdampingan dengan penuh tenggang rasa dalam perbedaan agama, tetapi tidak saling memengaruhi untuk masuk dan memeluk suatu agama tertentu. Pola hidup bersaudara ini merupakan kerangka umum budaya lokal yang menjadi acuan bagi pertumbuhan perilaku mulai dari rumah, keluarga, dan masyarakat. Nilai-nilai yang melekat pada pola hidup orang bersaudara, seperti inklusivitas, kebersamaan, dan tolong-menolong (gotong royong). Adalah unsur perekat masyarakat Ambon yang khas karena memiliki justifikasi dalam adat dan tata kehidupan tradisional sebagai suatu kearifan lokal. Proses penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan dan sistem lokal sesungguhnya dapat dikatakan bahwa ajaran dalam sistem *pela gandong* pada hakikatnya nenek moyang, para leluhur masyarakat Ambon telah mengajarkan dan mempraktikkan pola kehidupan yang pluralis dan heterogenitas. Terpetik dari berbagai informasi yang diperoleh menimbulkan optimisme, bahwa sistem *pela gandong* saat ini masih berperan penting. Rasa persatuan dan identitas bersama disadari dan dihayati dengan kuat upacara-upacara pembaruan *pela* (*upacara panas pela*) masih

UIN Padangsidimpuan

sering berlangsung.[60]

Peranan *pela gandong* semakin memberikan ruang untuk rekonsiliasi semakin tercipta, di mana segredasi antarwilayah yang tadinya memisahkan dua komunitas penduduk sekarang sudah semakin terbuka. Khazanah budaya peninggalan para leluhur yakni *pela gandong* semakin merekatkan tali silaturahmi yang sempat terputus. Penyembuhan luka batin setelah konflik berlangsung secara alamiah atas inisiatif masyarakat karena adanya kekerabatan atau persaudaraan itu. Proses rekonsiliasi konflik di Ambon dalam kerangka kerja adat tradisional, tentu saja hanya sebagian dari bentuk penyelesaian. Struktur masyarakat Ambon akan tetap terkoyak jika tidak ada penyelesaian politik untuk menghentikan konflik.[61]

Atas pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan revitalisasi dan penataan kembali *pela gandong* antardesa di Kota Ambon agar dapat berfungsi efektif sebagai pedoman bagi warga masyarakat dalam menjaga hubungan persaudaraan dan meminimalisasi konflik yang terjadi. Pelembagaan *pela gandong* sebagaimana adanya di tangan lembaga-lembaga adat yang independen cenderung bisa menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi bagi masyarakat lokal di Kota Ambon.

Seorang perempuan Rochom P'ngieng hilang saat masih kanak-kanak pada tahun 1989 ketika mengembalakan kerbau di belakang rumahnya di Distrik O'yadao, dekat hutan kamboja. jaraknya sekitar 600 km di sebelah timur laut Kota Phnom Penh, Provinsi Ratanakkiri, kawasan terpencil dan berbatasan langsung dengan hutan liar kamboja. Tahun 2007, dia ditemukan warga ketika berusaha mencuri makanan warga petani dalam kondisi membungkuk seperti monyet, mengais-ngais tanah, lantas ia dibawa pulang dalam kondisi telanjang. Perempuan yang berusia 29 tahun itu menghabiskan waktu 18 tahun hidupnya di hutan dan ditemukan berjarak sekitar 100 meter dari rumahnya. Kemudian

[60] Ratnieks, Foster, and Wenseleers, "Conflict Resolution in Insect Societies."
[61] Boulton, "Contemporary Conflict Resolution."

ia menghilang lagi dan ditemukan di sebuah jamban (toilet alami) di luar rumah sekitar 100 meter dari rumahnya. Dia ditemukan seorang penduduk desa di dasar sebuah liang yang dalam, merupakan sumur yang tak dipakai lagi dan dijadikan sebuah jamban (WC) sedalam 10 m. Tubuhnya terendam (11 hari) oleh tinja hingga setinggi dadanya. Orang Kamboja menjulukinya "perempuan hutan" dan "gadis setengah binatang". Sejak bergabung kembali dengan masyarakat, dia berulang kali terkena penyakit setelah menolak makanan. Sebelum menghilang, Rochom belum bisa berbicara, kecuali beberapa kata, namun ia mengerti jika diajak bicara oleh anggota keluarga.

Gambaran riil tersebut menandaskan bahwa siapa pun yang berada dalam lingkungan dengan "warna" tertentu akan berperilaku sebagaimana tradisi di lingkungan tersebut. Begitu pula, bila seorang anak sejak kecil hingga dewasa berada di lingkungan yang tidak toleran, tentu akan menjadi pelaku intoleran karena perilaku itu dianggap hal wajar.

Konflik intern dan antar-umat beragama di negeri ini di antaranya diakibatkan oleh pemahaman yang sempit oleh sebagian umat beragama terhadap agamanya dan agama yang dipeluk pihak lain.[62] Terutama perilaku intoleran diperagakan umat mayoritas terhadap umat minoritas di lingkungan mayoritas.[63] Sebagaimana Komnas HAM memanggil Walikota Kupang Nusa Tenggara Timur Jonas Salean untuk dimintai penjelasan terkait terhambatnya pembangunan Masjid Nur Musar di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Berdasarkan pengaduan umat Islam di Batuplat, panitia pembangunan masjid telah mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMb) 15 Juli 2011, hibah tanah seluas 1.000 m dari Pemkot Kupang untuk pembangunan masjid baru dilakukan tujuh hari kemudian, 22 juli 2011. Bahkan Walikota Kupang telah meletakkan batu pertama pembangunan. Akan tetapi, karena ada dugaan dari warga setempat (Kristen)

[62] Hilmy, "Radikalisme Agama dan Politik Demokrasi di Indonesia Pasca-Orde Baru."
[63] Simbolon, "Toleransi Agama Islam dan Kristen dalam Tradisi Belasungkawa di Desa Sipogu Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan."

IAIN Padangsidimpuan

bahwa ada penyimpangan sejak proses awal pembangunan, yakni yang menandatangani persetujuan pembangunan masjid hanya Ketua FKUB tanpa melalui musyawarah. Setelah kasus tersebut dilaporkan Komnas HAM dan dimediatorinya maka pada Senin 31 agustus 2015 komnas HAM mengajak dialog dengan pemerintah daerah setempat, Kantor Kemenag, Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Timor, FKUB, dan tokoh pemuda menemukan titik temu untuk damai. Hal ini bila tidak disikapi dengan langkah bijak secara riil oleh berbagai elemen masyarakat dan pemerintah, maka konflik berkepanjangan antar dan intern-umat beragama menjadi penyakit akut. Dengan demikian, perlu upaya yang bersumber dari lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan dalam menanamkan nilai agama yang toleran.

Agama sebagai sistem kepercayaan mempunyai aturan baku yang menjunjung moralitas dan ketaatan atas ajaran Tuhan sehingga agama menjadi institusi kebenaran (*the body of truth*), hukum (*law*), dan ritual (*rites*) yang umatnya harus tunduk pada kekuatan transendental.[64] Dalam realitanya, terjadi pelabelan atas dasar wilayah di Indonesia, seperti Aceh-Islam, Bali-Hindu, dan Kristen-Papua. Hal ini rentan terjadi konflik berupa politisasi sentimen etnoreligius di tengah kemajemukan agama (*religious plurality*) bila disulut faktor pemicu konflik (*trigger factor*). Sebagaimana konflik telah terjadi di Sambas, Sampit, Ambon, Poso, Maluku Utara, Papua, dan sebagainya. Luasnya wilayah geografis negeri ini juga memiliki berbagai budaya dan beragam genetika dengan jumlah sekitar 500 etnis. Etnis tersebut dipilah dalam tiga kelompok populasi (pohon logenetik). *Pertama*, merupakan manusia Batak, Jawa, Tengger, Bali, Dayak, Minang, dan Melayu (Riau). *Kedua*, Sasak, Makassar, Bugis, Sumba Timur, Kaili, Minahasa, dan Sumbawa. Masyarakat suku Toraja di Tana Toraja dan Toraja Utara Sulawesi Selatan diduga kuat merupakan satu rumpun dengan masyarakat di daerah Nias dan Batak. Ketiganya sama-sama penutur Austronesia dengan kesamaan loso budaya. Suku

[64] Asrori, "Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas."

www.pustakapelajar.com

Austronesia bermigrasi ke Nusantara pada 4.000 tahun lalu. *Ketiga*, manusia Alor dan Papua. Kelompok ketiga ini berbeda dengan kelompok pertama dan kedua karena nenek moyang kelompok ketiga yakni Aborigin Australia. Papua lebih dahulu menempati Kepulauan Indonesia yakni 50.000-60.000 tahun lalu, disusul kedatangan para migran penutur Austronesia pada 5.000-2.000 tahun lalu. Kedekatan secara teritorial antara Indonesia (Papua) dan Papua Nugini, sehingga tatkala era Orde Baru, warga Papua korban politik karena berbeda ideologi masih ketakutan kembali ke Indonesia karena trauma menjadi korban pelanggaran HAM. Data konsul Indonesia untuk Vanimo, Papua Nugini terdapat 12.000 warga Papua mengungsi di Papua Nugini sejak 1984 hingga kini. Mereka berasal dari Jayapura, Biak Numfor, Merauke, dan Kepulauan Yapen yang tersebar di Vanimo, Port Moresby, Lae, dan Wewak. Pengungsi tersebut meresahkan warga Papua Nugini karena mengambil alih tanah untuk lahan pertanian. Kondisinya memprihatinkan karena anak-anak tidak sekolah, akibat hidupnya berpindah-pindah dan tak berkewar- ganegaraan hingga kini. Meskipun demikian, mereka belum mau kembali ke Indonesia karena terpengaruh informasi negatif tentang Indonesia.

Dua kali serangan bom atau teror ke Paris Perancis membuat dunia semakin gusar dan terus mencari kambing hitam, PBB merespons serius dan secara resmi mengumumkan pernyataan perlawanan terhadap terorisme dengan segala variannya dan menjadi musuh dunia. Jauh sebelum itu, sekadar untuk mengingat kembali tentang serangan teroris 9/11 terhadap World Trade Center (WTC) dan Pentagon. Bermuara dari itu, teror telah mengubah abad kedua puluh satu menjadi dunia yang didominasi perang melawan terorisme global di bawah komando Amerika Serikat. Mereka juga memperkukuh citra Islam dan Muslim sebagai agama dan masyarakat yang harus ditakuti dan dilawan.

Melekatkan agama sebagai satu varian potensial pemicu tindakan radikal atau kekerasan merupakan hal yang sulit. Hal ini, karena agama dianggap sebagai ajaran yang selalu diasosiasikan dengan ajaran penuh dengan nilai kearifan, kedamaian,

IAIN Padangsidimpuan

dan keselamatan. Dalam setiap tindakan radikal yang berwujud kekerasan terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, kehancuran, dan kematian. Tindakan radikal yang dilakukan oleh Imam Samudra, cs. misalnya, dengan semangat jihadnya telah memunculkan kontradiksi dan sinisme dari internal penganut Islam. Wajah sejuk agama sangat tidak mungkin dilekatkan dengan segala tindakan radikal apalagi sampai berakibat penghancuran dan kematian mengenaskan.

Tindakan radikal atau kekerasan dengan label agama seringkali diterjemahkan oleh sebagian orang sebagai *legal doctrine* yang harus dilaksanakan. Pembolehan (*permissiveness*) terhadap bentuk tindakan radikal atau kekerasan resmi terus ditoleransi dan bahkan disetujui. Pada saat yang sama, toleransi terhadap berbagai bentuk kekerasan semakin berkurang. Tampaknya, tidak selalu jelas pada situasi mana kekerasan bisa dipandang sebagai penyimpangan dan pada situasi mana dianggap bukan penyimpangan. Faktasitasnya, situasi yang sama bisa berlaku bagi dua pandangan oleh orang yang berbeda.

Tindakan beberapa bentuk kekerasan, seperti terorisme atau penjabalan (*mugging*) yang disinyalir dilakukan oleh kelompok radikal terus menebar ancaman dan memakan korban. Sepanjang tahun 2015, dunia dikejutkan dengan bom bunuh diri di Perancis, terakhir terjadi di gedung konser yang memakan korban 153 orang dan ratusan orang masih dirawat. Di Indonesia sendiri, teror dan tindakan radikal kerap kali muncul dalam pelbagai bentuknya, seperti perusakan tempat ibadah, fasilitas umum, bom bunuh diri di Bali dan Jw Marriot Hotel Jakarta, dan aksi teror Sarinah.

Perilaku mengancam jauh lebih menonjol dari kekerasan terbuka, sebagaimana kelompok ISIS dan lainnya sering lakukan; dan kekerasan defensif jauh lebih menonjol dari kekerasan agresif. Perilaku teror dan mengancam mengomunikasikan pada orang lain suatu maksud untuk menggunakan kekerasan terbuka bila diperlukan. Orang yang melakukan ancaman sesungguhnya tidak bermaksud melakukan kekerasan, namun berupaya agar bisa mengontrol orang lain. Max Weber (1958) menganggap teror dan

IAIN Padangsidimpuan

ancaman sebagai bentuk kekerasan dan merupakan unsur penting kekuatan (power), kemampuan untuk mewujudkan keinginan seseorang sekalipun menghadapi keinginan yang berlawanan. Teroris sering kali mendemonstrasikan keinginannya untuk mewujudkan ancamannya.

Perilaku kekerasan tidak muncul dari ruang hampa, tetapi lahir sebagai reaksi kolonialisme di Eropa. Kekerasan bisa juga muncul pada skala yang berbeda, seperti konflik antar-orang (*interpersonal conflict*), antarkelompok (*inter-group*), kelompok dengan negara (*vertical conflict*), dan konflik antarnegara (*inter-state conflict*). Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya.

Harvey Greisman menunjukkan bahwa kekerasan berkaitan dengan gagasan dasar kita tentang hubungan dominasi yang *legitimate* dan tidak *legitimate*. Sering kali perilaku yang sama dide finisikan berbeda, tergantung pada perilaku tersebut dilakukan oleh seorang revolusioner, radikal, atau petugas resmi. Greisman lebih lanjut menjelaskan bahwa perbedaan simbolik ini dibuat karena kekuatan negara secara tersirat dianggap *legitimate* dan rasional; sementara orang lain *unlegitimate*. Israel selama ini tidak akan dianggap oleh dunia (terutama AS dan sekutunya) sebagai *unlegitimate* terhadap tindakannya melakukan teror dan pembunuhan terhadap rakyat Palestina selama bertahun-tahun.

Tren revivalisme Islam yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan di dunia Arab-Islam, berkelindan dengan pelbagai gagasan dan tindakan yang terjadi di dunia. Perdebatan mengenai politikal Islam dan Islam religius menjadi titik starnya. Islam politik, yang kemudian dipahami sebagai Islam fundamentalis atau Islam radikal merupakan wacana yang menarik diamati. Kebangkitan fundamentalisme harus dilihat berdasarkan latar belakang kemunculan masyarakat post-tradisionalis.

Secara umum, fundamentalisme muncul sekurang-kurangnya pada dekade 1950-an. Strategi perjuangan Islam politik menginginkan institusionalisasi Islam dalam bentuk negara Islam, misalnya di Indonesia ada DI/TII, HTI, JAT, dan FPI kemudian dihadapkan dengan strategi perjuangan Islam kultural yang mementingkan

IAIN Padangsidimpuan

pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam di masyarakat. Belakangan ini, kalangan NU mengemukakan istilah Islam Nusantara dan menjadi tema Mu'tamar NU di Jombang. Eksistensi Islam Nusantara masih menjadi perdebatan sampai saat ini.

Konflik-koflik atau tindakan radikal muncul dalam setiap entitas stratifikasi sosial. Setiap stratifikasi adalah posisi yang layak diperjuangkan oleh manusia dan kelompoknya sehingga mereka memperoleh posisi yang lebih tinggi. Karenanya, relasi-relasi sosial manusia diwarnai oleh usaha-usaha untuk meraih posisi tinggi dalam stratifikasi sosial yang diwarnai dan diwujudkan melalui tindakan *zwectraditional* dari tipe ideal tindakan Weber.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Nur Syam, radikalisme dan masa depan hubungan agama-agama (makalah 10 Oktober 2005), Aden Rosadi, Radikalisme dan Pluralisme Agama (*Jurnal Adlia*, Vol. 8. No. 2. Juli-Desember 2014, Abu Rokhmat, Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal (*Jurnal Walisongo* Vol. 20 No. 1 Mei 2012 UNDIP), Biyanto, Menumbuhkan Civic Values di Kalangan Mahasiswa; Ikhtiyar Menangkal Radikalisme (*Jurnal Pertahanan,* April 2013. Vol.3 No. 1), Noemala Sary Mencegah Paham Radikalisme pada Sekolah (*Jurnal Manthiq,* Vol. 2 No. 2, 2017 IAIN Bengkulu).

Thakore[65] dalam penelitiannya menjelaskan bahwa konflik-konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat memiliki berbagai jenis latar belakang yang berbeda-beda. Konflik-konflik tersebut dapat dikelola dengan berbagai macam cara yang melibatkan setiap unsur masyarakat. Hubungannya dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini mendalami bagaimana pengelolaan konflik-konflik tersebut sehingga masyarakat merasakan kedamaian tanpa konflik.

Snow dan Cross[66] menyatakan melalui hasil penelitiannya bahwa radikalisme merupakan bagian dari konflik yang sangat

[65] Digvijaysinh Thakore, "Conflict and Conflict Management."

[66] Snow and Cross, "Radicalism within the Context of Social Movements: Processes and Types."

IAIN Bengkulu Jumpuan

sulit untuk diselesaikan. Elemen-elemen masyarakat dibutuhkan untuk bersatu mendampingi setiap aspek yang menjadi peluang timbulnya paham radikalisme di lingkungan masyarakat. Hubungan dengan penelitian ini adalah, penelitian ini mendalami bagaimana peran para tokoh yang menjadi elemen penting dalam mengelola paham radikalisme di lingkungan masyarakat.

C. KERANGKA BERPIKIR

Setiap sistem kehidupan memiliki permasalahan-permasalahan dalam keberlangsungannya. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi awal munculnya konflik. Konflik terjadi akibat ketidaksesuaian antara kenyataan dan perencanaan. Meskipun konflik tidak bisa dihindari, namun konflik yang muncul di dalam kehidupan masyarakat sangatlah bervariasi, mulai dari wujud dan besaran dampaknya.

Dampak konflik yang muncul saat ini adalah munculnya paham radikalisme. Radikalisme di tengah masyarakat masuk melalui celah-celah yang tidak disadari setiap orang. Sebagai contoh, bom bunuh diri yang terjadi di Kota Sibolga merupakan suatu kejadian yang mengejutkan karena masyarakat tidak menyadari ternyata di tengah mereka telah menyebar paham radikalisme.

Setiap konflik yang muncul membutuhkan setiap memiliki solusi. Resolusi yang dibangun tentunya membutuhkan peran setiap elemen masyarakat. Membangun suatu resolusi untuk menyelesaikan konflik di masyarakat memang bukanlah mudah, namun dengan kerja sama seluruh elemen berpengaruh di masyarakat, resolusi konflik akan mudah terbangun.

IAIN Padangsidimpuan

BAB 3

METODE PENELITIAN

IAIN Padangsidimpuan

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian sosial yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif antropologi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara (*interview*) berdasarkan fenomena di lapangan (*field research*) dan didukung oleh *literature review*. Penelitian ini dilandasi dari perilaku sosial yaitu dengan mendalami kenyataan sosial. Pada penelitian ini wawancara dilakukan terhadap beberapa informan, seperti, tokoh adat, tokoh agama, unsur pemerintah, FKUB, serta beberapa masyarakat. Kemudian data diolah dengan model triangulasi data. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat serta saling terkonfirmasi sehingga menghasilkan penelitian yang baik.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik kritis, di mana data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan akan disajikan dengan tampilan apa adanya dan menggunakan model analisis antropologis. Analisis ini bertujuan untuk menemukan jawaban masalah berdasarkan kajian antropologi hukum

Islam dan dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis-empiris yang dihasilkan dari masyarakat. Karena penelitian ini mengkaji tentang fenomena radikalisme, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model pendekatan sosiologi-antropologi.

Subjek penelitian diarahkan kepada informan utama berdasarkan pengetahuannya untuk merepresentasikan kondisi objektif lapangan. Karena penelitian ini terkait dengan realitas sosial, maka penelitian ini lebih difokuskan kepada tokoh agama, tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat. Penentuan sumber data dilakukan dengan teknik *snowball sampling* yaitu teknik bola salju dengan melakukan wawancara, observasi dari satu informan ke informan lain secara berkelanjutan, sehingga informasi yang ditemukan semakin lama semakin membesar seperti bola salju sampai akhirnya pencarian informan akan dihentikan ketika informasi sudah dianggap cukup sebagai bahan penulisan.

UIN Padangsidimpuan

B. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan mulai Maret hingga Oktober 2019 (Logbook kegiatan penelitian dapat dilihat pada lampiran). Penelitian ini dilaksanakan di daerah Tapanuli yang mencakup Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Sibolga, dan Kota Padangsidimpuan. Penentuan lokasi dilakukan untuk menemukan dan memperdalam konsep pengelolaan konflik dalam membangun damai di daerah Tapanuli.

C. SUBJEK PENELITIAN

Subjek penelitian ini adalah para tokoh di daerah Tapanuli. Tokoh yang dimaksud adalah tokoh agama untuk menenemukan konflik-konflik yang berlatar belakang agama serta peran agama dalam mengelola konflik tersebut. Selanjutnya adalah tokoh ma-

syarakat dan adat untuk menemukan apa saja konflik-konflik yang terjadi di masyarakat dengan latar belakang adat serta bagaimana peran tokoh tersebut dalam pengelolaannya.

D. TEKNIK DAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan teknik wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemerintah daerah sebagai informan. Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dengan jenis wawancara terbuka. Teknik wawancara diwujudkan ke dalam suatu instrumen penelitian.

Instrumen penelitian ini adalah pedoman wawancara. Instrumen disusun melalui tahapan *Focus Group Discussion* (FGD) yang selanjutnya divalidasi dengan teknik *content validity* oleh ahli (*expert judgement*). Instrumen yang dinyatakan valid dan layak selanjutnya digunakan untuk memperoleh data ke lapangan. Data yang diperoleh pada penelitian ini merupakan data kualitatif yang selanjutnya dianalisis dan disajikan dengan bentuk deskripsi.

IAIN Padangsidimpuan

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis pada penelitian ini terfokus pada upaya penafsiran yang dilakukan secara kritis dan objektif dengan memperhatikan aspek koherensi, autentisitas, dan independensi. Penelitian ini dilakukan melalui empat analisis bahan empirik, yaitu: melakukan reduksi data, dengan melakukan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan (*field note*). Kemudian melakukan reduksi data dan mengarahkan bahan berupa pengalaman informan dengan metode etnografis. Kemudian pemaparan bahan empirik. Pemaparan bahan empirik berupa *archetype* subjek penelitian, dimulai dengan proses reduksi yang kemudian disajikan dalam bentuk bahan yang terorganisir dengan membuat ringkasan terstruktur, kemudian analisis

itu diarahkan pada upaya merumuskan temuan-temuan konsep, pola perilaku, serta kategori elite dominan untuk mewakili masyarakat Tapanuli. Terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

IAIN Padangsidimpuan

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

IAIN Padangsidimpuan

A. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Tapanuli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa konflik yang pernah terjadi di daerah Tapanuli. Konflik-konflik tersebut ada yang berlatar belakang agama, budaya, politik, dan yang lainnya.

1. Konflik di Kota Sibolga

Temuan di lapangan, tepatnya di daerah Kota Sibolga menunjukkan bahwa terjadi konflik berupa teror bom. Konflik ini pada dasarnya membuat kaget seluruh masyarakat di daerah Kota Sibolga. Berdasarkan keterangan beberapa informan yang diperoleh, selama ini belum pernah terjadi yang namanya konflik khususnya berlatar belakang agama di daerah Kota Sibolga. Kota Sibolga memiliki masyarakat muslim yang relatif sama perbandingan jumlahnya dengan umat kristiani. Namun selama ini belum pernah terjadi konflik antar-agama di Kota Sibolga.

Penyebab terjadinya teror di Kota Sibolga berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan yang merupakan tokoh agama, adat, pemerintah, dan juga sekaligus menjadi saksi hidup

ledakan yang terjadi di Kota Sibolga adalah warga pendatang. Warga pendatang yang dimaksud berasal dari daerah Lampung, namun mereka memiliki keluarga atau kerabat jauh di Kota Sibolga. Pada dasarnya, kerabat dari pelaku ini sama sekali tidak mengetahui pelaku akan berbuat hal sekeji itu, hal ini dikarenakan tidak ada sama sekali pertanda bahwa pelaku merupakan bagian dari gerombolan teroris, terlebih di daerah Kota Sibolga sendiri selama ini tidak pernah terjadi konflik sejenis itu. Berdasarkan analisis informan, pemilihan Kota Sibolga sebagai daerah teror dikarenakan letak strategis Kota Sibolga. Selain strategis dari letak geografis karena berada di jalur lintas Sumatra dan daerah sumber daya laut yang berlimpah, daerah ini juga strategis dari aspek perkembangan keagamaan karena perbandingan jumlah muslim dan non-Muslim yang hampir seimbang. Oleh karena itu, sangat dapat dimaklumi ketika Kota Sibolga dipilih menjadi daerah teror.

Dampak dari konflik yang terjadi di derah Kota Sibolga berupa teror tersebut nyaris dikatakan tidak berlarut khususnya di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Sibolga yang bekerja sama dengan para tokoh masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh-tokoh lainnya untuk meyakinkan masyarakat Kota Sibolga akan keamanan di daerah tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pascakejadian teror bom yang terjadi, kelumpuhan Kota Sibolga tidak lebih dari tiga hari. Kelumpuhan selama tiga hari yang dimaksud bukan dikarenakan warga yang trauma atau hal lainnya yang terkait, namun kelumpuhan terjadi dikarenakan dilaksanakannya proses evakuasi dan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Di sisi lain, kerabat pelaku yang notabene merupakan warga masyarakat Kota Sibolga juga tidak serta-merta dikucilkan oleh warga, malah FKUB Kota Sibolga mengarahkan warga untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan dan tidak saling menyalahkan di lingkungan masyarakat Kota Sibolga khususnya.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi konflik ini agar tidak terjadi hal yang sama di daerah Kota Sibolga, pemerintah melakukan kerja sama dengan para tokoh agama, tokoh adat/

IAIN Padangsidimpuan

budaya, dan tokoh-tokoh lainnya. Tokoh-tokoh agama yang dilibatkan dan memang memiliki pengaruh kuat di daerah Kota Sibolga adalah Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Pemerintah Kota Sibolga langsung meminta kerja sama FKUB dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya untuk dapat mengontrol dan meredam terulangnya kejadian terror tersebut. Selain itu, pemerintah Kota Sibolga juga menginginkan peran dari setiap elemen kemasyarakatan, termasuk ranah pendidikan untuk ikut serta dalam menghadapi konflik-konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat.

2. Konflik di Tapanuli Tengah

Bergeser sedikit dari Kota Sibolga, di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki jenis konflik, penyebab konflik, dan resolusi konflik yang berbeda dengan Kota Sibolga. Konflik yang terjadi di daerah ini adalah konflik agama. Konflik agama yang dimaksud adalah konflik yang muncul di daerah Tapanuli Tengah dilatari permasalahan antar-umat beragama. Permasalahan tersebut terjadi karena masih belum kuatnya toleransi antar-umat beragama di daerah tersebut. Pada dasarnya, konflik di daerah ini sangat jarang terjadi, hal tersebut dikonfirmasi dari beberapa tokoh yang menjadi informan pada penelitian ini. Namun beberapa permasalahan terkadang muncul ketika masyarakat non-Muslim melakukan prosesi keagamaan, misalnya menyembelih babi. Daerah Tapanuli Tengah sendiri merupakan daerah dengan perbandingan masyarakat muslim dan non-Muslim yang relatif sama, namun cenderung lebih banyak warga non-Muslim (muslim 45 persen non-Muslim 55 persen). Jadi, ketika masyarakat non-Muslim melakukan pemotongan hewan babi, terkadang bisa mengganggu daerah penduduk muslim, misalnya ketika mereka membersihkan daging potongan babi ke sungai. Hal ini berdampak pada ketidaknyamanan masyarakat muslim, khususnya bagi mereka yang tinggal di hilir sungai. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi permasalahan ini, misal dengan menyampaikan langsung ke masyarakat kristiani, menyampaikan

IAIN Padangsidimpuan

ke tokoh agama, dan menyampaikan ke pemerintah setempat. Namun masih saja ada oknum yang melakukan hal tersebut. Dampaknya otomatis membuat masyarakat muslim geram yang pada akhirnya menimbulkan konflik.

Permasalahan lain yang muncul di daerah Tapanuli Tengah adalah terjadinya pernikahan berbeda agama. Hal ini bahkan sering terjadi dikarenakan memang daerah Tapanuli Tengah sendiri merupakan daerah yang jumlah penduduknya hampir seimbang antara yang muslim dan yang non-Muslim. Sehingga sangat sering terjadi pernikahan berbeda agama di daerah tersebut. Ada beberapa motif pernikahan beda agama yang terjadi di daerah Tapanuli Tengah, diantaranya motif pergaulan, motif jasa, motif ajakan, dan motif dakwah. Pernikahan dengan motif pergaulan adalah motif yang paling sering terjadi dan lumrah terjadi. Pergaulan antara remaja muslim dan remaja non-Muslim tidak dapat dihindari di Tapanuli Tengah dikarenakan jumlah mereka yang hampir seimbang. Pergaulan ini misalnya terjadi di sekolah dan lingkungan masyarakat. Komunikasi intens yang terjadi di pergaulan muda mudi ini membentuk suatu kecocokan yang pada akhirnya tidak jarang mereka memilih untuk menikah dengan segala risiko yang akan mereka dapatkan. Motif jasa adalah motif lain yang terjadi sebagai wujud latar belakang terjadinya pernikahan beda agama.

Dampak dari konflik-konflik yang terjadi di daerah Tapanuli Tengah khususnya bagi masyarakat adalah terjadinya kesenjangan di lingkungan masyarakat. Masyarkat muslim khususnya merasa keberatan dengan kejadian tersebut sehingga sempat terjadi perselisihan antarwarga di daerah Tapanuli Tengah. Selain itu, pernikahan beda agama yang juga sering terjadi di daerah Tapanuli Tengah membuat problema tersendiri bagi warga masyarakat Tapanuli Tengah. Memang konflik yang ditimbulkan bukanlah bersifat umum, melainkan bersifat pribadi antarkeluarga. Namun dampak tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah dan para tokoh di daerah Tapanuli Tengah karena dikhawatirkan dampaknya semakin meluas dan mengarah kepada tindakan yang tidak diinginkan di lingkungan masyarakat. Terlepas dari kedua perma-

IAIN Padangsidimpuan

salahan tersebut, daerah Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan daerah yang memiliki potensi kedamaian yang baik. Meskipun demikian, pemerintah bekerja sama dengan tokoh membuat suatu solusi mengatasi masalah tersebut.

Resolusi konflik yang diberikan pemerintah beserta para tokoh di Tapanuli Tengah adalah dengan memperkuat hubungan kekerabatan antarwarga. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, proses mempererat persaudaraan ini dilakukan dengan penguatan konsep *Dalihan na tolu*. Konsep ini menekankan tentang hubungan kekerabatan atau nasab kekeluargaan. Dalam konteks budaya Batak, konsep *Dalihan na tolu* ini dipakai untuk menentukan hubungan saudara dan *partuturan* di kalangan masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa warga asli Tapanuli Tengah memang memiliki hubungan kekerabatan atau kekeluargaan meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Konsep *Dalihan na tolu* ini terbukti dapat mempererat hubungan silaturahmi antarwarga, khususnya dalam meredam konflik-konflik yang terjadi di kalangan masyarakat.

IAIN Padangsidimpuan

3. Konflik di Mandailing Natal

Mandailing Natal merupakan daerah terluas di daerah Tapanuli bagian selatan yang luasnya mencapai 6.000 km^2 dengan jumlah penduduk muslim terbanyak juga. Di daerah Mandailing Natal sendiri terdapat salah satu pondok pesantren tertua yaitu Pondok Pesantren al-Musthafawiyah yang terletak di Desa Purba Baru. Dari pesantren inilah pada Da'i dan Da'iah terlahir, bahkan tidak jarang Menteri Agama Republik Indonesia terlepas perhatiannya dari pondok pesantren ini. Banyaknya jumlah penduduk dengan beragama Islam di Mandailing Natal membuat daerah ini betul-betul dinilai sebagai salah satu Serambi Mekkahnya daerah Tapanuli bagian selatan. Namun meski terbilang minoritas, penduduk Mandailing Natal juga ada yang non-Muslim. Berbicara tentang konflik, daerah Mandailing Natal juga memiliki konflik-konflik yang terjadi di lingkungan masyarakatnya. Di daerah Kabupaten Mandailing Natal, jenis konflik yang terjadi adalah konflik sosial

yaitu pernah suatu ketika kepala penggalan babi diletakkan persis di hadapan masjid yang merupakan rumah ibadah warga muslim. Kejadian ini terjadi bukanlah dilakukan oleh warga non-Muslim secara keseluruhan, namun masih dari kalangan warga kristiani dan berlatar belakang kepentingan individu. Hal ini sempat membuat tegang warga dan membuat khawatir pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Permasalahan lain atau konflik lain yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal adalah maraknya penggusuran rumah-rumah lokalisasi. Kabupaten Mandailing Natal merupakan daerah dengan jumlah penduduk muslim yang sangat dominan mencapai lebih dari 85 persen warganya adalah muslim. Di sisi lain, pendidikan pesantren di daerah ini berkembang sangat pesat, bahkan pondok pesantren tertua di Sumatra Utara ada di daerah ini, yaitu Pesantren al-Musthafawiyah, Purba Baru. Latar belakang tersebut membuat daerah ini memiliki tingkat keislaman yang sangat kuat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, penggusuran tempat lokalisasi oleh warga sudah sering terjadi. Terlepas dari kedua permasalahan tersebut, daerah Kabupaten Mandailing Natal merupakan daerah dengan konflik agama yang sangat minim. Kehidupan warganya berlangsung dengan damai antara yang beragama Islam dan yang non-Muslim. Namun konflik yang terjadi tetaplah memiliki dampak di kalangan masyarakat.

Konflik sosial lain yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal adalah sengketa lahan oleh perusahaan. Menurut informan kunci, sengketa lahan ini sudah sejak lama terjadi dan belum tuntas hingga saat ini. Hampir setiap tahun selalu ada laporan terkait sengketa lahan di daerah ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh seluruh *stakeholder* di pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal untuk mengatasi permasalahan tersebut, namun hingga kini belum menunjukkan hasil yang optimal. Kejadian ini menjadi catatan penting setiap pemerintah yang menjabat di daerah ini.

Dampak dari konflik yang terjadi di daerah Kabupaten Mandailing Natal adalah terjadinya keresahan warga. Pada kasus pertama, yaitu terjadinya peletakan penggalan kepala babi di depan

IAIN Padangsidimpuan

masjid di daerah Natal, dampaknya adalah terjadi perselisihan antara warga muslim dan yang non-Muslim dikarenakan warga non-Muslim awalnya menuduh warga muslim yang melakukannya. Namun pada kenyataannya setelah dilakukan penyelidikan oleh aparat keamanan terbukti pelakunya ternyata warga non-Muslim. Namun, peristiwa tersebut bukanlah didasari atas nama umat kristiani, melainkan atas dasar individu. Kemudian, pada kasus kedua dampak dari maraknya lokalisasi di daerah kabupaten Mandailing Natal mengakibatkan kegeraman warga sehingga warga melakukan penggusuran terhadap tempat-tempat tersebut. Penggusuran terjadi dikarenakan pelaku tidak mengindahkan peringatan dari masyarakat dan santri Pondok Pesantren Musthafawiyah untuk segera menutup tempat lokalisasi tersebut karena telah meresahkan warga. Terakhir, pada kasus ketiga berdampak pada arogansi masyarakat yang menuntut haknya untuk dikembalikan semakin meningkat. Hal ini jelas memicu keributan dan juga memprovokasi masyarakat lainnya. Alhasil, kerap kali terjadi demo besar-besaran yang berujung pada kerugian aset pemerintah.

Resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk mengatasi konflik-konflik tersebut adalah dengan melakukan kerja sama dengan FKUB dan MUI Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, melibatkan tokoh adat dan tokoh pendidikan juga dilakukan untuk memperkuat jalan upaya yang dilakukan daam membangun damai di Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, daerah Kabupaten Mandailing Natal memiliki keunikan tersendiri dari daerah lain di Tapanuli. Sebagai kabupaten dengan penduduk muslim terbesar di daerah Tapanuli, pengaruh ulama di daerah Kabupaten Mandailing Natal sangatlah besar. Maka, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terus melakukan kerja sama dengan para ulama dalam membangun damai di daerah Kabupaten Mandailing Natal.

UIN Sumatera Utara Medan

4. Konflik di Padang Lawas

Padang lawas merupakan salah satu daerah pecahan Kabupaten Tapanuli Selatan. Di daerah ini memiliki masyarakat yang didominasi oleh warga muslim. Umat kristiani bisa dibilang sedikit. Sama dengan daerah Mandailing Natal, daerah Padang Lawas juga memeliki beberapa pondok pesantren yang melahirkan beberapa tokoh-tokoh agama Islam. Di daerah kabupaten Padang lawas memiliki konflik yang berbeda dengan daerah lainnya. Konflik yang terjadi, antara lain perbedaan pendapat antara para pakar *Tasawuf* dengan pakar *Fiqih* dalam konteks ini adalah sesama muslim dalam menentukan hukum agama. Selain itu, perbedaan pendapat antara Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga menjadi salah satu konflik yang terjadi di daerah Kabupaten Padang Lawas. Kedua konflik tersebut merupakan konflik antar sesama muslim. Kemudian, pernah terjadi pembakaran gereja di daerah Padang lawas ini. Konflik ini melibatkan warga muslim dengan non-Muslim. Awal dari konflik ini adalah maraknya pembangunan gereja tanpa izin di daerah kabupaten Padang lawas yang meresahkan warga sekitar ketika itu. Sempat beredar kabar bahwa warga non-Muslim menuduh warga muslim sebagai pelaku. Namun berdasarkan hasil penyelidikan, gereja sudah terbakar sebelum massa muslim datang ke lokasi.

Dampak yang terjadi dari konflik para pengikut ilmu *Tasawuf* dengan pengikut ilmu *Fiqih* sempat berdampak pada perselisihan di kalangan masyarakat sesama muslim di Kabupaten Padang lawas. Hal yang sama juga terjadi pada perselisihan paham antara NU dan Muhammadiyah di daerah tersebut yang membuat perelisihan pada masyarakat. Di sisi lain, konflik tentang pembakaran gereja di Kabupaten Padang Lawas sangat membuat keresahan di kalangan masyarakat karena masyarakat non-Muslim menuduh masyarakat muslim yang melakukannya, sedangkan masyarakat muslim tidak pernah melakukan hal tersebut. Atas dasar hal tersebut, pemerintah bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, baik itu tokoh adat maupun tokoh agama berusaha untuk

IAIN Padangsidimpuan

mencari solusi mengatasi perpecahan atau konflik yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas.

Resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk mengatasi konflik-konflik tersebut adalah dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh adat dalam upaya mempersatukan perselisihan paham antara paham *Tasawuf* dan paham *Fiqih* dan antara NU dan Muhammadiyah. Langkah yang dilakukan oleh ulama dan tokoh adat adalah dengan mempersatukan ulama dari kalangan *Tasawuf* dengan ulama dari kalangan *Fiqih* di dalam suatu pertemuan berbentuk forum pengajian. Forum pengajian yang dilakukan sangat bervariasi dan tentunya tanpa menunjukkan garis haluan paham yang dianut sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antarkedua penganut paham. Dengan merangkul tokoh-tokoh kedua belah pihak dan atas asas persatuan antar-umat, semua sepakat untuk duduk bersama dalam suatu forum. Tujuannya adalah untuk menyatukan persepsi atau kesepahaman akan satu kata, yaitu Islam. Hal yang sama juga dilakukan untuk mempersatukan antara NU dan Muhammadiyah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, cara ini pada akhirnya berhasil dilakukan, sehingga pada saat ini konflik terhadap perbedaan tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian untuk konflik pembakaran gereja, pemerintah Kabupaten Padang Lawas menginstruksikan pihak polisi selaku pihak keamanan masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga konflik bisa diselesaikan dengan baik.

IAIN Padangsidimpuan

5. Konflik di Padang Lawas Utara

Tapanuli Utara merupakan salah satu daerah dengan potensi sumber daya masyarakat yang menjanjikan di Provinsi Sumatra Utara. Syarat akan kentalnya budaya Tapanuli, daerah ini disebut dengan tanah adat. Salah satu ritual adat di daerah ini adalah meminum minuman sejenis *khamar* di data acara adat. Minuman yang dimaksud bukanlah minuman *khamar* buatan di dalam botol yang dijual di tempat-tempat diskotik dan lainnya. Minuman tersebut dinamai "*cuka*" di daerah ini.

Minuman ini akan menjadi salah satu hidangan khusus di dalam acara adat dalam masyarakat bahkan acara adat akan terasa tabu ketika hidangan itu tidak ada. Semua kalangan akan menikmati hidangan tersebut, mulai dari tokoh pemerintahan, tokoh adat, bahkan tokoh agama. Namun menurut informasi yang diperoleh, hidangan itu hanya berlaku di saat acara adat saja, setelah acara selesai maka minuman itu tidak diperbolehkan lagi untuk diminum.

Permasalahan mulai muncul di saat acara selesai namun masih saja ada warga yang mengonsumsi minuman tersebut. Artinya, ada pelanggaran yang dilaksanakan masyarakat. Dampaknya adalah munculnya keresahan masyarakat yang diakibatkan oknum-oknum yang mabuk di lingkungan masyarakat karena meminum minuman tersebut. Puncak keresahan warga semakin meningkat di saat oknum ini mulai merasuki warga-warga lain. Ujungnya adalah perusakan karakter di lingkungan masyarakat. Hal ini jelas saja bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan beragama yaitu pembentukan akhlak yang baik.

Resolusi konflik yang dimunculkan di daerah Padang Lawas Utara ini adalah dengan mengedepankan tokoh masyarakat atau adat yang dibantu oleh tokoh pemerintah dan tokoh agama. Pertanyaannya, kenapa harus tokoh masyarakat? Menurut informasi yang diperoleh dari informan, tokoh adat lebih memiliki pengaruh besar dibanding tokoh lainnya di daerah Padang Lawas Utara. Namun dukungan dari tokoh-tokoh yang lain diperlukan sebagai penguat dari peran tokoh adat. Perlakuan yang diberikan adalah penyelesaian konflik dengan rasa kekeluargaan dan adat istiadat. Penyelesaian ini dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan adat istiadat yang terdapat di Padang Lawas Utara tanpa menentang ajaran agama dan merugikan masyarakat lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pertemuan rutin antartokoh dan masyarakat untuk memberikan sosialisasi pentingnya penanaman akhlak dan kesadaran untuk hidup rukun dan damai.

IAIN Padangsidimpuan

6. Konflik di Tapanuli Utara

Tapanuli Utara yang beribukota di Tarutung merupakan salah satu daerah yang dihuni oleh muslim minoritas di Provinsi Sumatra Utara. Dominasi umat kristiani begitu besar. Tapanuli Utara memiliki ragam konflik sosial dan keagamaan yang berbeda dengan daerah-daerah yang lainnya. Berdasarkan pada penyampaian yang diperoleh dari informan penelitian, konflik yang terjadi di Tapanuli Utara sejauh ini merupakan konflik kecil yang dampaknya tidak terlalu besar pula. Besar kecilnya suatu konflik memang tidak bisa ditentukan dengan aspek subjektivitas, namun pada dasarnya tidak terjadi gejolak besar yang terjadi di lingkungan masyarakat akibat dari konflik yang terjadi. Paling tidak hal itu menunjukkan bahwa dampak konflik di Tapanuli Utara sejauh ini belumlah besar.

Konflik berlatar belakang agama yang terjadi di Tapanuli Utara pada dasarnya cenderung jarang terjadi. Pernah terjadi konflik pembangunan masjid yang tidak diizinkan oleh masyarakat kristiani. Dugaan awal dari masyarakat muslim adalah dikarenakan sikap intoleran masyarakat umat kristiani terhadap masyarakat muslim, sehingga sempat terjadi ketegangan antarmasyarakat. Namun setelah diselidiki ternyata masjid itu dibangun di daerah pemukiman masyarakat kristiani dan bermasalah atas perizinan pembangunannya. Untuk sekadar informasi, tempat tinggal masyarakat di Tapanuli Utara memiliki pola yang berbeda dengan daerah lain. Di Tapanuli Utara pemukiman masyarakat muslim dengan masyarakat kristiani dibuat tidak tergabung ke dalam satu desa, biasanya jika di satu desa tersebut masyarakat muslim, maka masyarakat kristiani akan di desa lainnya, meskipun desanya bersebelahan. Namun pembagian pola ini bukan berarti tidak pernah terjadi kontak atau interaksi di antara keduanya, justru toleransi masyarakat di daerah ini sangat tinggi. Hal tersebut terbukti dari ketika masyarakat kristiani mengadakan pesta pernikahan, masyarakat muslim tetap akan diundang, namun dapur masak makanan untuk masyarakat muslim akan berbeda

IAIN Padangsidimpuan

dengan masyarakat kristiani. Hal ini dikarenakan masyarakat kristiani menyadari betul akan batasan-batasan ajaran agama masyarakat muslim.

Kembali ke topik permasalahan, daerah Tapanuli Utara sangat terkenal dengan kentalnya adat istiadatnya. Dalam konteks pembangunan masjid tadi, masyarakat daerah Tapanuli Utara, khususnya masyarakat kristiani tersebut pada dasarnya tidak akan mempermasalahkan pembangunan tersebut apabila komunikasi adat dilaksanakan. Komunikasi adat yang dimaksud adalah komunikasi yang dilakukan dengan tokoh adat dan masyarakat setempat akan hajat yang akan dilaksanakan, yaitu membangun masjid di daerah tersebut. Komunikasi yang dimaksud di sini adalah sejenis pemberitahuan kepada warga akan niat yang akan dilaksanakan. Namun pada kenyataannya, masyarakat muslim yang hendak membangun masjid itu memang tidak melakukan hal tersebut. Masyarakat muslim tidak melakukannya dikarenakan ada satu warga setempat yang memang merupakan dari orang terpandang di daerah tersebut yang menyatakan akan kesediaannya untuk menanggungjawabi pembangunan tersebut. Masyarakat muslim memercayai hal tersebut, terlebih beliau berasal dari orang terpandang di daerah tersebut, jadi mereka menganggap beliau sudah merupakan perwakilan tokoh masyarakat. Nyatanya, masyarakat kristiani tidak menganggap demikian sehingga terjadilah konflik. Kesimpulan dari kasus ini adalah terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat muslim dan kristiani.

Atas dasar kasus tersebut, maka tokoh agama, tokoh pemerintah, dan tokoh masyarakat turun tangan membentuk suatu tim pencari solusi atas kasus tersebut. Masing-masing elemen menjalankan perannya untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Tokoh agama Islam dan kristiani yang notabenenya tergabung dalam FKUB Tapanuli Utara bersatu untuk mengamankan masing-masing masyarakatnya dengan pendekatan keagamaan masing-masing. Tokoh adat berupaya untuk mendamaikan warga masyarakat dengan pendekatan kekeluargaan melalui konsep *Dalihan Na Tolu*. Pemerintah memfasilitasi kea-

IAIN Padangsidimpuan

manan masyarakat dengan bantuan lembaga-lembaga pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kepolisian. Pada akhirnya, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan damai. Pembangunan masjid yang tadinya akan dilaksanakan tidak jadi dilaksanakan karena memang tidak mengikuti prosedur yang seharusnya dilaksanakan.

Konflik lain yang terjadi di Tapanuli Utara adalah terjadinya perkawinan berbeda agama. Hal yang sama memang terjadi juga di daerah Tapanuli Tengah. Namun, dampak yang terjadi sangatlah berbeda. Jika di Tapanuli Tengah pada akhirnya keluarga mengikhlaskan putra putrinya untuk memilih jalannya, maka di Tapanuli sebaliknya, keluarga sangat mengecam perbuatan anaknya karena perbuatan tersebut dianggap sebagai aib bagi keluarga, baik muslim maupun kristiani. Khusus untuk umat kristiani, pernah terjadi perkawinan antara anak pendeta kristiani dan masyarakat muslim. Pada akhirnya, pendeta tersebut menanggalkan statusnya sebagai pendeta dikarenakan merasa malu bahwa anaknya telah menebar aib bagi keluarganya. Menariknya, anak pendeta ini pada akhirnya mualaf memeluk ajaran agama Islam. Bukan satu dua kali terjadi konflik perkawinan beda agama di Tapanuli Utara, bahkan dampak yang paling besar adalah si anak tidak diakui lagi sebagai bagian dari keluarganya atau bahkan sampai pada titik kericuhan.

Apabila terjadi permasalahan-permasalahan seperti ini, biasanya yang turun tangan dalam mengatasinya adalah tokoh adat dengan membawa perselisihan tersebut ke dalam penyelesaian kekeluargaan. Masyarakat Tapanuli Utara sangat menjunjung tinggi konsep *Dalihan Na Tolu* sebagai konsep pegangan hidup. *Dalihan Na Tolu* merupakan salah satu konsep kekeluargaan yang menggambarkan kekeluargaan yang erat antara *mora*, *anak boru*, dan *kahanggi* dalam pertuturan di masyarakat Tapanuli Utara. Ketiganya merupakan langkah awal dalam memilih sikap di lingkungan masyarakat. Menariknya, model resolusi konflik dengan pendekatan konsep *Dalihan Na Tolu* ini lebih dapat diterima oleh masyarakat Tapanuli Utara dibanding dengan pendekatan ajaran

IAIN Padangsidimpuan

agama. Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan jika dilakukan dengan pendekatan agama, maka akan berdampak terhadap sentimental pergesekan antar-agama yang pada akhirnya setiap pemeluk akan mempertahankan ajaran agamanya dan konflik pun akan terjadi karena terjadi perbedaan pendapat. Berbeda jika dilakukan dengan konsep kekeluargaan dengan membawa pendekatan *Dalihan Na Tolu*, masyarakat akan dengan mudah menerimanya dikarenakan setiap masyarakat satu pemahaman terhadap konsep tersebut. Bahwa antara *mora, anak boru,* dan *kahanggi* memiliki perannya masing-masing dalam bersikap.

Terlepas dari kedua kasus konflik yang diuraikan, konflik di Tapanuli Utara bisa dikatakan tidak ada lagi. Namun, menurut informan yang diwawancarai, masyarakat Tapanuli Utara pada dasarnya tidak mengkhawatirkan konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat Tapanuli Utara yang pelakunya adalah sesama warga masyarakat Tapanuli Utara karena konsep *Dalihan Na Tolu* akan mudah untuk mempersatukan kembali masyarakat dan mendamaikan konflik yang terjadi tersebut. Akan tetapi, yang dikhawatirkan adalah ketika konflik itu muncul dan dibawa oleh oknum-oknum dari luar daerah Tapanuli Utara. Hal itu akan sangat sulit untuk diselesaikan dikarenakan perbedaan prinsip dan paradigma. Oleh karena itu, pemerintah Tapanuli Utara juga terus menekankan masyarakat Tapanuli Utara untuk menjaga perdamaian dan tetap waspada terhadap politik adu domba dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk membantu pemerintah, tokoh agama dan tokoh adat juga bergerak dalam membantu menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kedamaian sesama masyarakat meskipun dengan latar belakang agama atau kepercayaan yang berbeda. Hasilnya, hingga saat ini konflik di Tapanuli Utara masih bisa terkendalikan dengan baik dan damai.

B. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah-daerah di Tapanuli memiliki beberapa cara dalam menjaga keamanan dan

IAIN Padangsidimpuan

kenyamanan masyarakat dari konflik-konflik, khususnya pada konflik radikalisme. Cara-cara tersebut antara lain dengan semakin memperkuat peran pendidikan formal, memperkuat jalinan kerja sama forum komunikasi antar-umat beragama, memperkuat peran tokoh adat dan masyarakat, memperkuat peran pemerintah, dan menekankan pendidikan di keluarga.

Salah satu cara yang dilakukan masyarakat di Tapanuli dalam menghalangi terjadinya konflik di lingkungan masyarakat adalah dengan memanfaatkan peran pendidikan formal. Pendidikan formal dianggap sebagai penanaman sikap, pengetahuan, dan keterampilan social yang sangat baik kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil temuan Robbins [1] yang menyatakan bahwa keterampilan sosial dapat dimiliki dengan baik dengan memanfaatkan interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah. Interaksi sosial dan pembentukan sikap yang baik terhadap siswa dapat mengurangi bahkan menghindari terjadinya konflik.[2]

Selain melatih keterampilan sosial siswa, peran pendidikan formal dalam mengelola konflik yang terjadi di Tapanuli adalah dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal pada kurikulum yang dijalankan di sekolah-sekolah, sehingga dapat menjadikan siswa-siswa semakin mencintai daerahnya. Dengan cinta terhadap daerahnya, maka siswa akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban daerah tersebut, sehingga pada akhirnya konflik akan mudah untuk dihindari.[3] Lebih lanjut, Milhench[4] yang menyatakan bahwa pendidikan di sekolah akan dapat membantu dalam membatasi terjadinya konflik di dalam kehidupan bermasyarakat. Pengurangan konflik tersebut terjadi selain dikarenakan pendidikan

UIN Padangsidimpuan

[1] "Do Psychosocial and Study Skill Factors Predict College Outcomes? A Meta-Analysis."

[2] Raudenbush and Eschmann, "Does Schooling Increase or Reduce Social Inequality?"; Quinn, *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China.*

[3] Fajarini, "Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter"; Ridwan, "Landasan Keilmuan Kearifan Lokal"; Mungmachon, "Knowledge and Local Wisdom : Community Treasure"; Kusumasari and Alam, "Local Wisdom-Based Disaster Recovery Model in Indonesia"; Dahliani, "Local Wisdom in Built Environment in Globalization Era"; Kondratowicz, "Local Wisdom."

[4] "Conflict Resolution."

sekolah dapat membentuk karakter siswa, pendidikan di sekolah juga dapat menciptakan interaksi sosial yang baik bagi siswa, sehingga siswa lebih siap untuk bermasyarakat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, masyarakat Kota Sibolga misalnya, mereka meyakini bahwa peran pendidikan dapat memberikan kestabilan sosial di lingkungan masyarakat karena dengan belajarnya siswa ke sekolah, maka siswa tidak hanya cerdas pengetahuannya, namun juga memiliki sikap dan keterampilan yang baik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Krathwohl [5] dan Pitt [6] yang menyatakan bahwa proses pembelajaran yang terjadi di dalam suatu sistem pendidikan formal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa.

Selain peran pendidikan formal, peran organisasi keagamaan juga sangat besar dalam menjaga kedamaian dan mengurangi konflik di lingkungan masyarakat Kota Sibolga. Informan menjelaskan bahawa pemerintah Kota Sibolga selalu meminta bantuan kepada organisasi keagamaan dalam membantu menjaga keamanan di Kota Sibolga, sehingga Kota Sibolga aman dari konflik. Tidak bisa dimungkiri bahwa peran agama dalam mengarahkan pola pikir masyarakat sangatlah besar.[7] Dengan pengaruh agama melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh para tokohnya, pola pikir masyarakat lebih mudah untuk diarahkan. Hal tersebut jelas menjadi suatu peluang yang besar untuk dimanfaatkan.

Kasus bom bunuh diri yang terjadi di Kota Sibolga pada bulan Maret 2019 yang lalu menjadi saksi bagaimana masyarakat Kota Sibolga tidak terprovokasi atas kejadian itu. Hal tersebut dijelaskan oleh informan dikarenakan adanya peran andil organisasi keagamaan dan dibantu oleh peran tokoh lainnya dalam mengontrol situasi saat itu. Organisasi keagamaan FKUB Kota Sibolga yang merupakan organisasi keagamaan yang menyatukan seluruh

[5] "A Revision of Bloom ' s Taxonomy :"

[6] "Education."

[7] Stanley, "On The Psychology of Religion"; Bloom, "Religion, Morality, Evolution"; Hobson, "Religion and Spirituality"; Geertz, "Religion as A Cultural System."

UIN Sumatera Utara

agama ikut dalam membantu mendamaikan situasi. Kerja sama antartokoh agama dapat menjadikan situasi yang damai karena *cover* yang seolah menunjukkan bahwa permasalahan yang timbul adalah permasalahan agama sudah tidak diterima lagi.

Pemerintah daerah di Tapanuli mengambil peran strategis dalam mengelola konflik yang terjadi di Kota Sibolga. Peran strategis yang diambil adalah dengan mengontrol dan memperkuat keja sama seluruh elemen masyarakat. Elemen masyarakat yang dirangkul untuk bekerja sama, antara lain tokoh pendidikan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Peran pemerintah tersebut efektif untuk mengontrol terjadinya konflik dan menjadikan keamanan di dalam suatu daerah lebih terjaga.[8] Lebih lanjut, rasa aman, nyaman, dan konflik yang kecil dari masyarakat di dalam suatu daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pemerintahan.[9]

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan menunjukkan bahwa pemerintah Kota Sibolga menjadi yang terdepan untuk menjamin keamanan seluruh masyarakat Kota Sibolga saat terjadinya ledakan bom di Kota Sibolga, sehingga sistem yang berjalan di lingkungan masyarakat nyaris bisa dikatakan tidak lumpuh. Kaget dan trauma masyarakat hanya terlihat di hari kejadian saja, setelah itu sistem berjalan dengan baik. Langkah yang diambil pemerintah Kota Sibolga dalam menjamin keamanan Kota Sibolga pasca-ledakan yang terjadi adalah dengan mengerahkan seluruh pasukan keamanan dan merangkul organisasi keagamaan dan juga tokoh-tokoh lainnya untuk saling bekerja sama dalam meyakinkan masyarakat terhadap keamanan dan agar masyarakat tidak terprovokasi. Langkah tersebut ternyata berhasil dalam mengelola kepanikan masyarakat pasca-terjadinya ledakan. Selanjutnya, hingga saat ini elemen-elemen tersebut menjadi bagian yang dijadikan sebagai suatu tim dalam bekerja

[8] Atkinson and Castro, "Goverment"; La Porta et al., "The Quality of Goverment"; Mulgan, "Goverment Accountability for Outsourced Services."

[9] Ünsar, "Leadership"; Anderson, Reckhenrich, and Kupp, "Follow The Leader"; Goleman, "The Focused Leader"; Amabile and Khaire, "Creativity and The Role of The Leader."

IAIN Padangsidimpuan

sama mengelola konflik di Kota Sibolga.

Tokoh adat memiliki peran yang besar dalam mengelola konflik di Sibolga. Menurut informasi yang diperoleh dari informan, masyarakat Kota Sibolga sama seperti masyarakat lainnya di Provinsi Sumatra Utara yang sangat memperhitungkan adat dan budaya. Tokoh adat menjadi orang yang memiliki peran yang sangat penting dalam konteks keberlangsungan adat dan budaya di dalam suatu daerah.[10] Peran tokoh adat di Kota Sibolga adalah untuk memberikan suatu pendekatan untuk mempersatukan masyarakat melalui pendekatan adat. Menurut informasi yang diperoleh dari informan, tokoh adat di Kota Sibolga memiliki pengaruh yang signifikan dalam menyelesaikan konflik di Kota Sibolga.

Pendekatan adat yang dilakukan adalah dengan menekankan pemahaman terhadap konsep "*Dalihan na tolu*". Konsep ini merupakan suatu konsep yang dimiliki oleh masyarakat di daerah Tapanuli khususnya yang mengedepankan hubungan kekerabatan dan persaudaraan. Dengan kesadaran akan hubungan persaudaraan yang dimiliki, maka konflik di lingkungan masyarakat akan terkontrol.[11] Kontrol yang diberikan oleh tokoh adat melalui pendekatan konsep "*Dalihan na tolu*" selama ini berjalan dengan efektif. Pemikiran masyarakat tentang ketidakmungkinan dalam memusuhi keluarga sendiri marupakan salah satu bukti keberhasilan tokoh adat Kota Sibolga dalam menanamkan konsep "*Dalihan na tolu*" kepada masyarakat.

Elemen lain yang dijadikan sebagai elemen pendukung dalam menjaga keamanan dan mengurangi konflik di masyarakat Kota Sibolga adalah peran keluarga. Menurut informasi yang diperoleh, keluarga dilibatkan dalam upaya untuk memperkecil tingkat konflik di Kota Sibolga. Pemilihan elemen pendidikan keluarga sebagai salah satu elemen yang dapat meminimalisasi konflik yang

[10] Forshee, *Culture and Customs of Indonesia*; Geertz, "Culture and Social Change: The Indonesian Case."

[11] Armawi, "Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan Na Tolu Dan Good Governance dalam Birokrasi Publik"; Lubis, Joebagio, and Pelu, "Dalihan Na Tolu Sebagai Kontrol Sosial dalam Kemajuan Teknologi"; Martial and Asaad, "The Land and Tree Tenure-Based Dalihan Natolu Customs for Tree Management in South Tapanuli, North Sumatra."

ada adalah karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan setiap masyarakat yang paling intens.[12]

Peran pendidikan di keluarga sejauh ini dianggap efektif dalam menjaga kerukunan di Kota Sibolga. Hal tersebut sesuai dengan penyampaian informan yang menyatakan bahwa setiap kepala desa melaporkan tentang kesan aman dan damai di desa terlihat setelah keluarga dilibatkan dalam mengontrol terjadinya konflik di Kota Sibolga.

Di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Padang Lawas Utara memiliki kesamaan resolusi konflik. Kesamaan tersebut merupakan kecenderungan mengedepankan peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik di daerah tersebut. Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan daerah tersebut dikenal sebagai daerah dengan penerapan adat yang sangat kental. Oleh karena itu, untuk menanggulangi konflik sosial yang terjadi, maka penyelesaian dengan pendekatan tokoh adat jauh dianggap lebih efektif dalam mengatasi permasalahan. Namun demikan, dukungan dari tokoh lainnya juga sangat dibutuhkan untuk penguat kepada masyarakat.

Di Mandailing Natal dan Padang Lawas malah mengedepankan peran tokoh agama untuk menyelesaikan konflik. Hal ini jelas dikarenakan dominasi masyarakat muslim dan kentalnya pengaruh agama Islam di daerah ini. Oleh karena itu, jelas bahwa pendekatan dengan memanfaatkan peran tokoh agama sangat diperlukan untuk merangkul masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Tokoh pemerintah dan adat menyadari hal tersebut, oleh karena itu mereka mendukung penuh untuk menciptakan masyarakat yang rukun dan damai.

IAIN Padangsidimpuan

[12] Hattery and Smith, "Family"; Meghir and Palme, "Educational Reform, Ability, and Family Background"; Ennis, "Equality of Educational Opportunity."

IAIN Padangsidimpuan

BAB 5
PENUTUP

IAIN Padangsidimpuan

A. SIMPULAN

Konflik-konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat daerah Tapanuli sangat bervariasi. Konflik-konflik tersebut meliputi konflik berlatar belakang keagamaan, budaya, politik, sosial, dan bahkan individu. Setiap konflik tersebut berdampak pada ketidakstabilan pada masyarakat di daerah Tapanuli sehingga pemerintah di masing-masing daerah menerapkan suatu resolusi konflik. Konflik yang terjadi di daerah Tapanuli antara lain konflik yang berlatar belakang agama, misalnya terjadinya pembakaran rumah ibadah yang berawal dari ketidaksukaan terhadap agama lain. Selain itu, paham radikalisme juga menjadi konflik yang harus serius untuk diselesaikan karena dampaknya adalah teror yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan masyarakat.

Resolusi konflik yang dilakukan di daerah Tapanuli juga bervariasi, bergantung pada konflik yang dihadapi. Namun secara keseluruhan setiap pemerintah daerah selalu melibatkan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, pihak keamanan, dan pihak lainnya yang tergabung dalam *stakeholder* untuk menemukan suatu solusi dalam upaya mendamaikan masyarakat.

Kerja sama yang dilakukan membuat kehidupam masyarakat di daerah-daerah tersebut berlangsung damai.

Dengan demikian, tiga unsur masyarakat yaitu tokoh pemerintah atau pemerintahan, tokoh agama, dan tokoh adat dianggap memiliki pengaruh yang besar dalam menjaga stabilitas masyarakat Tapanuli.

B. SARAN

Penelitian ini mendalami tentang konflik-konflik yang terjadi di daerah Tapanuli serta resolusi konflik yang dibangun. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah pentingnya menguji pengaruh tentang resolusi-resolusi yang diperoleh pada penelitian ini terhadap masing-masing konflik yang muncul di daerah Tapanuli.

IAIN Padangsidimpuan

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M.A. *Islamic Studies*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Aden Rosadi, "Radikalisme dan Pluralisme Agama: Konflik Antar Umat, Agama dan Realsi Kekuasaan Industri di Kabupaten Bekasi," *Jurnal Adliya,* Vol. 8, No. 2 Edisi Juli-Desember 2014.

Amabile, Teresa M., and Mukti Khaire. "Creativity and The Role of The Leader." *Harvard Business Review*, 2008.

Anderson, Jamie, Jörg Reckhenrich, and Martin Kupp. "Follow The Leader." *Business Strategy Review*, 2013. https://doi.org/10.1111/j.1467-8616.2013.00992.x.

Arif, M. *Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: LKIS, 2008.

Armawi, Armaidy. "Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan Na Tolu Dan Good Governance Dalam Birokrasi Publik." *Jurnal Filsafat* 18, no. 2 (2008): 157–66.

Asrori, Ahmad. "Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas." *KALAM*, 2017. https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331.

Atkinson, Robert, and Daniel Castro. "Goverment." *Digital Quality of Life: Understanding the Personal and Social Benefits of the Information Technology*, 2008.

Aziz, Fajar Sulthoni, and Klurak Baru. "Implementasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi." In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan Dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta*, 2011.

Arif Rahmansyah Nst

Bloom, Paul. "Religion, Morality, Evolution." *Annual Review of Psychology*, 2012. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100334.

Borum, Randy. "Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories." *Journal of Strategic Security*, 2011. https://doi.org/10.5038/1944-0472.4.4.1.

Boulton, Frank. "Contemporary Conflict Resolution." *Medicine, Conflict and Survival*, 2011. https://doi.org/10.1080/13623699.2011.645292.

Budhy Munawar Rachman. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid.* Jakarta: Paramadina-Mizan-CSL, 2006.

Creed, W. E. Douglas. "Voice Lessons: Tempered Radicalism and the Use of Voice and Silence*." *Journal of Management Studies*, 2003. https://doi.org/10.1111/1467-6486.00389.

Dahliani, D. "Local Wisdom in Built Environment in Globalization Era." *International Journal of Education and Research*, 2015.

Digvijaysinh Thakore, Digvijaysinh Thakore. "Conflict and Conflict Management." *IOSR Journal of Business and Management*, 2013. https://doi.org/10.9790/487x-0860716.

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. *Teori Konflik Sosial*, terj. Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Ennis, Robert H. "Equality of Educational Opportunity." *Educational Theory*, 1976. https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.1976.tb00708.x.

Effendi, B., & Prasetyo, H. dalam Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo (peny.), *Radikalisme Agama.* Jakarta: PPIM-IAIN, 1998. Fajarini, Ulfah. "Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter." *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal* 2, no. 3 (2016): 75–90. https://doi.org/10.15408/sd.v1i2.1225.

Forshee, Jill. *Culture and Customs of Indonesia. Ebook*, 2006.

Geertz, C. "Culture and Social Change: The Indonesian Case." *Man*, 1984. https://doi.org/10.2307/2802324.

Geertz, Clifford. "Religion as A Cultural System." In *Anthropological Approaches to the Study of Religion*, 2013. https://doi.

IAIN Padangsidimpuan

org/10.4324/9781315017570.

Goleman, Daniel. "The Focused Leader." *Harvard Business Review*, 2013.

Haba, John. "Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso." Jakarta: ICIP dan Eropean Commision, 2007.

Habib, Achmad. *Konflik Antar Etnik Di Pedesaan*. LKIS PELANGI AKSARA, 2004.

Hattery, Angela J., and Earl Smith. "Family." In *Handbook of Sociology and Human Rights*, 2015. https://doi.org/10.4324/9781315634227.

Hilmy, Masdar. "Radikalisme Agama dan Politik Demokrasi di Indonesia Pasca-Orde Baru." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2015. https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.33.

Hobson, Suzanne. "Religion and Spirituality." In *The Cambridge Companion to Modernist Culture*, 2014. https://doi.org/10.1017/CCO9781107278882.004.

Humphreys, Macartan. "Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution." *Journal of Conflict Resolution*, 2005. https://doi.org/10.1177/0022002705277545.

"Islamic Education." In *Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory*, 2017. https://doi.org/10.1007/978-981-287-588-4_100551.

"Islamic Philosophy of Education." In *Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory*, 2017. https://doi.org/10.1007/978-981-287-588-4_100552.

Jehn, Karen A., and Elizabeth A. Mannix. "The Dynamic Nature of Conflict: A Longitudinal Study of Intragroup Conflict and Group Performance." *Academy of Management Journal*, 2001. https://doi.org/10.2307/3069453.

Khaled Abou el-Fadl, *The Great Theft: Wresting Islam from the Extremists*. New York: HarperCollins Publisher, 2005.

Kondratowicz, Basia. "Local Wisdom." *European Pharmaceutical Contractor*, 2011. https://doi.org/10.4337/9781781002490.00025.

UIN Raden Fatah Palembang

Krathwohl, David R. "A Revision of Bloom ' s Taxonomy": *Theory Into Practice*, 2002.

Kusumasari, Bevaola, and Quamrul Alam. "Local Wisdom-Based Disaster Recovery Model in Indonesia." *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 2012. https://doi.org/10.1108/09653561211234525.

Liliweri, Alo. *Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. LKIS PELANGI AKSARA, 2005.

Lubis, Muhammad Novriansyah, Hermanu Joebagio, and Musa Pelu. "Dalihan Na Tolu Sebagai Kontrol Sosial Dalam Kemajuan Teknologi." *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya* 13, no. 1 (2019): 25–33.

Martial, Tri, and Mhd Asaad. "The Land and Tree Tenure-Based Dalihan Natolu Customs for Tree Management in South Tapanuli, North Sumatra." *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology* 6, no. 2 (2016): 180–85.

Meghir, Costas, and Marten Palme. "Educational Reform, Ability, and Family Background." *American Economic Review*, 2005. https://doi.org/10.1257/0002828053828671.

Milhench, Rory. "Conflict Resolution." *International Journal of Phytoremediation*, 2004. https://doi.org/10.1080/1357527042000244428.

Morton Deutsch, Peter T. Coleman, Eric C. Marcus. "The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice." John Wiley and Sons Inc, 2006.

Mulgan, Richard. "Goverment Accountability for Outsourced Services." *Australian Journal of Public Administration*, 2006. https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2006.00481.x.

Mulyana, W. Kusuma, "Analisis Sosial tentang Kerusuhan Massa Kasus Pemilu 1997", dalam Ahmad Suaedy (ed.), Kekerasan dalam Perspektif Pesantren, (Jakarta: Grasindo-P3M. 2000)

Mungmachon, Miss Roikhwanphut. "Knowledge and Local Wisdom : Community Treasure." *International Journal of Humanities and Social Science*, 2012.

Munip, Abdul. "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah."

IAIN Padangsidimpuan

Jurnal Pendidikan Islam, 1970. https://doi.org/10.14421/jpi.2012.12.159-181.

Nordås, Ragnhild, and Nils Petter Gleditsch. "Climate Change and Conflict." In *Competition and Conflicts on Resource Use*, 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10954-1_3.

Noor, H. M., "Islam, Terorisme dan Agenda Global" dalam Perta, Vol. V/No. 02/202

Nur Syam, *Islam Pesisir.* Yogyakarta: LkiS, 2005.

Perrow, Charles. "Conservative Radicalism." *Organization*, 2008. https://doi.org/10.1177/1350508408095820.

Pitt, D. C. "Education." In *The Future of the Environment: The Social Dimensions of Conservation and Ecological Alternatives*, 2013. https://doi.org/10.4324/9781315862897.

Pardianto, "Komunikasi Agama dan Kearifan Lokal: Dimensi Pesan dan Saluran Komunikasi Agama Masyarakat Maluku" dalam *Jurnal Komunikasi Islam,* Vol. 07, No. 02, Desember 2017

Porta, Rafael La, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert Vishny. "The Quality of Goverment." *NBER Working Paper Series*, 1998.

Potrafke, Niklas. "Islam and Democracy." *Public Choice*, 2012. https://doi.org/10.1007/s11127-010-9741-3.

Quinn, Riley. *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China*, 2017. https://doi.org/10.4324/9781912282340.

Qurtuby, Sumanto Al. "The Islamic Roots of Liberation, Justice, and Peace: An Anthropocentric Analysis of the Concept of &Quot;Tawhīd &Quot;" *Islamic Studies*, 2013. https://doi.org/10.2307/43997226.

Ratnieks, Francis L.W., Kevin R. Foster, and Tom Wenseleers. "Conflict Resolution in Insect Societies." *Annual Review of Entomology*, 2006. https://doi.org/10.1146/annurev.ento.51.110104.151003.

Raudenbush, Stephen W., and Robert D. Eschmann. "Does Schooling Increase or Reduce Social Inequality?" *Annual*

IAIN Padangsidimpuan

Review of Sociology, 2015. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-071913-043406.

Ridwan, Nurma Ali. "Landasan Keilmuan Kearifan Lokal." *Ibda`* | *Vol. 5* | *No. 1* | *Jan-Jun 2007* |*27-38*, 2007.

Robbins, Steven B., Huy Le, Daniel Davis, Kristy Lauver, Ronelle Langley, and Aaron Carlstrom. "Do Psychosocial and Study Skill Factors Predict College Outcomes? A Meta-Analysis." *Psychological Bulletin*, 2004. https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.2.261.

Roibin, "Agama dan Budaya: Relasi Konfrontatitif dan Kompromistik" *Jurnal Hukum dan Syuariah,* Volume I, No. 1, 2010

Rokhmad, Abu. "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2012. https://doi.org/10.21580/ws.20.1.185.

Simbolon, Elida Mawarni. "Toleransi Agama Islam dan Kristen dalam Tradisi Belasungkawa di Desa Sipogu Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan." Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018.

Snow, David, and Remy Cross. "Radicalism within the Context of Social Movements: Processes and Types." *Journal of Strategic Security*, 2011. https://doi.org/10.5038/1944-0472.4.4.5.

Springer, Devin R., James L. Regens, and David N. Edger. *Islamic Radicalism and Global Jihad. Islamic Radicalism and Global Jihad*, 2009.

Stanley, Hiram M. "On The Psychology of Religion." *Psychological Review*, 1898. https://doi.org/10.1037/h0070727.

Syadli, M. "Konsep Pendidikan Dalam Al-Qur'an." *Al Qalam*, 2019. https://doi.org/10.32678/alqalam.v18i88-89.1455.

Tamuri, Ab Halim, Muhamad Faiz Ismail, and Kamarul Azmi Jasmi. "A New Approach in Islamic Education: Mosque Based Teaching and Learning." *JIAE: Journal of Islamic and Arabic Education*, 2012.

Thomas Reuther and Alexander Horstman (eds.), *Faith in the Future: Understnading the Revitalization of Religion Cultural Tradition in Asia.* Leiden: Brill, 2013.

www.padangsidimpuan

Turmudi, Endang, dan M Riza Sihbudi. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Ünsar, Sinan. "Leadership." In *Contributions to Management Science*, 2014. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05248-9_1.

Uzuntiryaki, Esen, and Ömer Geban. "Effect of Conceptual Change Approach Accompanied with Concept Mapping on Understanding of Solution Concepts." *Instructional Science*, 2005. https://doi.org/10.1007/s11251-005-2812-z.

Willis, Ellen, and Nona Willis Aronowitz. "Radical Feminism and Feminist Radicalism." In *The Essential Ellen Willis*, 2015. https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816681204.003.0025.

Wirahadi Ahmad, Afridian, and Yossi Septriani. "Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis Dan Cara Menguranginya." *Jurnal Akuntansi & Manajemen* 3, no. 2 (2008): 47–55.

Yunus, Firdaus M. "Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya." *Substantia* 16, no. 2 (2014): 217–28.

Yusoff, Kamaruzaman. "Islamic Radicalism in Malaysia: An Overview." In *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 2010. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.458.

IAIN Padangsidimpuan

Civitas Akademika & Keluarga Besar
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
mengucapkan
SELAMAT
& SUKSES
Atas Dilantiknya
Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag
Pada Tanggal 28 Juli 2022
sebagai
REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
Periode 2022 - 2026
oleh: MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
uinsyahada

PARA PENULIS

Muhammad Darwis Dasopang, lahir di Siburbur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1964. Nama ayah Marasamin Dasopang (alm. 1989) dan nama ibu Sarilla Rambe (alh. 2018), merupakan putra keenam dari tujuh bersaudara. Pada saat ini bekerja sebagai dosen di jurusan Pendidikan Agama Islam S-1 Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan dan S-2 Program Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan. Menikah dengan Enila Malan Dongoran, S.Kep., Ns. tanggal 26 Agustus 1993 dengan dikaruniai saeorang anak yakni Husna Bulkis Dasopang. Alamat rumah Jalan K.H. Zubeir Ahmad Ujung Kelurahan Sadabuan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.

Pendidikan formal yang ditempuhnya dimulai dari Sekolah Dasar Negeri Siraga pada pagi hari dan sorenya dipasangkan dengan Sekolah Arab Kampung, lulus SD (1977), kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Sipiongot Kecamatan Dolok dan tamat/lulus 1981, pada tahun yang sama melanjutkan ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Padangsidimpuan lulus 1984, terus melanjutkan perkuliahan di tahun yang sama ke S-1 Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Sumatera Utara Padangsidimpuan, tamat/lulus 1989. Pada 1999 melanjutkan ke S-2 Prodi PEDI (Pendidikan Islam) Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, dan lulus 2002. Melanjutkan untuk mengambil Prodi Ilmu Pendidikan Program Pascasarjana S-3 di Universitas Negeri Padang Sumatera Barat pada 2010 selesai/lulus awal tahun 2017.

IAIN Padangsidimpuan

Riwayat Pekerjaan

1. Guru Agama SMK Pancadharma Padangsidimpuan 1989-1991.
2. CPNS/Tenaga Pengajar/Urusan Rumah Tangga dan Pembuat Laporan pada Subbag. Umum IAIN-SU Padangsidimpuan 1991-1993.
3. Dosen,Urusan Humas/Keprotokoleran, dan Kegiatan Ilmiah Subbag. Umum IAIN-SU Padangsidimpuan 1993-1998.
4. Dosen STAIN Padangsidimpuan 1998-2013.
5. Dosen IAIN Padangsidimpuan 2013 sampai dengan sekarang.
6. Sekretaris UPMA STAIN Padangsidimpuan Juni 2003-September 2004.
7. Ketua Prodi PGMI STAIN Padangsidimpuan Oktober 2004-Oktober 2006.
8. Sekretaris PPSB STAIN Padangsidimpuan November 2006-Agustus 2010.
9. Ketua LPPM IAIN Padangsidimpuan 2014-2018.
10. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Padangsidimpuan 2018.

Pengalaman Organisasi

1. Departemen Ilmiah dalam organisasi Senat Mahasiswa IAIN-SU Padangsidimpuan 1986.
2. Ikut Aktif dalam Struktur Organisasi Mahasiswa Kedaerahan Padangbolak Sekitarnya (HMPS) 1985-1989.
3. Pengurus PMII Cabang Padangsidimpuan 1987.
4. Pengurus Komite Madrasah di MAN-2 Padangsidimpuan 2014-2020.
5. Pengurus MUI Kota Padangsidimpuan 2015-2019.
6. Pengurus NU Kota Padangsidimpuan 2016-2019.

Kegiatan Ilmiah

1. Konsep Pendidikan Islam Dalam Pengembangan Fitrah Artikel dalam jurnal Fitrah (1993).
2. Penelitian "Tingkat Keberagamaan Orang Tua dan Hubungannya

IAIN Padangsidimpuan

dengan Pendidikan Agama Anak Karyawan Industri di Desa Tanjung Morawa "A" Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Serdang" (1996).

3. "Pengembangan Pendidikan Pesantren dalam Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia" Artikel dalam Jurnal Fitrah okber-November-Desember 1996.
4. Penelitian "Kontribusi Persepsi Siswa tentang Kepribadian dan Profesionalisme Guru Agama Hubungannya dengan prestasi belajar siswa di SMU Negeri Padangsidimpuan" (2002).
5. "Peranan Micro Teaching dalam Pembentukan Keterampilan Mengajar" artikel dalam Jurnal Tarbiyah IAIN-SU Januari-Maret 2000.
6. Penelitian "Hubungan Penerapan Pembelajaran Kontekstual dan Penilaian Kinerja dalam Pembelajaran Statistik pada Mahasiswa Prodi PAI di STAIN Padangsidimpuan" (2005).
7. "Pendidikan Islam di Malaisia" artikel dalam Jurnal Al-Hikmah Januari 2008.
8. "Pendidikan Islam Bagi Dunia Kerja" artikel dalam Jurnal Al-Intiqal Januari-Juni 2008.
9. "Kepribadian dan Profeionalisme Guru Agama sebagai Modal Membangun Masyarakat Cerdas dan Religius" artikel dalam Jurnal Forum Paedagogik Juni 2009.
10. "Persfektif Strategi Pembelajaran Akhlak Mulia Membangun Transformasi Sosial Siswa SMP" artikel Jurnal Multidisipliner Ilmu-Ilmu Keislaman1 Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan hal. 27-45 (2014).
11. "Menarik Benang Merah Pendidikan Islam Bermartabat" artikel dalam Jurnal Darul'Ilmi (2) hal. 1-9 (2015).

Judul Disertasi

- Pengembangan Strategi Pembelajaran Kontekstual dengan Pendekatan Teoantroposentris dalam Menanamkan Akhlak Mulia pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Kota Padangsidimpuan.

IAIN Padangsidimpuan

Samsuddin Pulungan, tokoh yang cukup lama bergerak dalam bidang pendidikan, lahir di Mandailing Natal pada tanggal 3 Februari 1964 adalah anak sulung dari empat bersaudara yang dilahirkan dari pasangan sang ayah Amiralif Pulungan dengan sang ibu Sitiapasa. Menikah di Padangsidimpuan tanggal 21 Juni 1996 dengan Tihanna Harahap dan dikurniai tiga orang anak: Faizuddin Pulungan, Haniful Pasca Pulungan, dan Khairunnisa Fithri Pulungan.

Identitas Tempat Tinggal dan Identitas Lainnya

1. Alamat: Jln. Sutan Soripada Mulia Gang Melati 13 Sadabuan Kelurahan Tanobato Kecamatan Padangsidimpuan Utara.
2. Pekerjaan: Dosen STAIN Padangsidimpuan/Kepala Perpustakaan STAIN Padangsidimpuan.
3. Telp/HP: 08126382760.
4. E-Mail/Blog: samdin74@yahoo.co.id/sampulungan.blogpost.com.

IAIN Padangsidimpuan

Riwayat Pendidikan

Pendidikannya dimulai Sekolah Dasar Negeri Hutabargot (1976), Madrasah Tsanawiyah Negeri Padangsidmpuan (1979), Madrasah Aliyah Pesantren Musthafawiyah Purba Baru (1982), Sarjana Muda Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara (1987), Sarjana Lengkap Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara (1989), dan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (2000).

Riwayat Pekerjaan

1. Wakil Kepala Madrasah Aliyah Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Sumut Padangsidimpuan dari (1990-1996).
2. Calon Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sumut Padangsidimpuan (1994).
3. Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan dari 1995 s/d sekarang.

4. Kepala Pusat Sumber Belajar STAIN Padangsidimpuan (1996-1998).
5. Kepala Pusat Komputer STAIN Padangsidimpuan (2000-2004).
6. Ketua Prodi D-2 PGMI STAIN Padangsidimpuan (2005-2006).
7. Konsultan MTQ.N ke-30 Tk. Provinsi Sumatera Utara di Padangsidimpuan (2006).
8. Kepala Perpustakaan STAIN Padangsimpuan dari 2009 s/d sekarang.
9. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Padangsidimpuan (2013-2017).
10. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Padangsidimpuan 2017 s/d 2022.

Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Umum PMII Cabang Padangsidimpuan (1985).
2. Ketua Cabang Gerakan Pemuda (GP) Anshor Kabupaten Tk. II Tapanuli Selatan (1987).
3. Wakil Sekretaris Pengurus Cabang NU Tk. II Tapanuli Selatan (1998).
4. Wakil Sekretaris Orsat ICMI Padangsidimpuan (1999).
5. Sekrtaris Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) Tk. II Tapanuli Selatan (1998).
6. Sekretaris DPD KNPI Tk. Tapanuli Selatan (1989).
7. Sekretaris DP. MUI Kota Padangsidimpuan (2008).
8. Sekretaris Umum Bazda Kota Padangsidimpuan 2011 s/d sekarang.
9. Sekretaris Umum FKUB Kota Padangsidimpuan 2011 s/d sekarang.
10. DPS Perbankan Syariah Oloan Ummah Padangsidimpuan 2008 s/d sekarang.
11. Wakil Ketua Tanfiziah NU Kota Padangsidimpuan 2015 s/d sekarang.

IAIN Padangsidimpuan

Karya Ilmiyah

1. Menguak STAIN Padangsidimpuan, Relais pada harian *Waspada*.
2. Konsep Islam dalam Pengembangan Sains.
3. Peranan Inteleketual Muslim dalam Perspektif Al-Qur'an, Relais pada harian *Waspada*.
4. Menguak Syariat Islam di Aceh, Relais pada harian *Serambi Indonesia*.
5. Fir'aunisme dalam Perspektif Al-Qur'an, Relais pada harian *Serambi Indonesia*.
6. Mengungkap Teori Langit, Relais pada harian *Serambi Indonesia*.
7. Peranan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam dalam Menghadapi Abad ke-21, dalam *Majalah Fitrah STAIN Padangsidimpuan*.
8. Peranan Orangtua dalam Menumbuhkan Agama Pada Anak (Suatu Kajian Psikologis), dalam Majalah Al-Ahsan Kopertais Wil. IX.
9. Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam, Makalah *Seminar Sehari* dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup dan Konservasi Alam.
10. Peranan Pemuda di Era Globalisasi, Makalah *Seminar Sehari* dalam memperingati HUT KNPI Tk. II Tapanuli Selatan.
11. Penulis aktif pada harian Waspada dan Serambi Indonesia.
12. Menulis penelitian tentang kecerdasan emosional.
13. Menulis Penelitian Reformasi Sistem Pendidikan (Sebuah Gagasan Inovatif Kualitas Pendidikan di Kota Padangsidimpuan.
14. Pemenang lomba menulis dalam surat kabar dalam rangka HARDIKNAS "Paradigma Baru Kualitas Pendidikan Kita".
15. Penulis akitf pada Majalah Nasional Bias.
16. Menulis buku Kecerdasan Emosional Membangun Paradigma Mencerdaskan Anak dalam Keluarga Muslim.

IAIN Padangsidimpuan

Nama	:	Ahmatnijar
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
NIP	:	19680202 200003 1 005
NIDN	:	2002026803
Tempat, Tanggal Lahir	:	Aek Bargot, 02 Februari 1968
email	:	ahamatnijar@gmail.com
Nomor HP	:	08136347950
Alamat Kantor	:	Jalan T Rizal Nurdin, Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan
Telp. Kantor	:	0634.22080
Mata Kuliah Wajib	:	Filsafat Hukum Islam

IAIN Padangsidimpuan

PENGURUS CABANG
NAHDLATUL ULAMA
KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

RESOLUSI KONFLIK LOKAL DI TAPANULI

Keragaman masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan ras, serta perkembangan sosial, politik dan ekonomi yang dinamis, menyebabkan masyarakat secara umum dapat mengalami konflik sosial, dan bahkan bisa menimbulkan konflik dengan kekerasan. Fenomena ini tampak marak dalam beberapa tahun belakangan ini. Banyak faktor yang memicu konflik tersebut.

Untuk itu dibutuhkan pemahaman dan strategi yang tepat untuk mencegah konflik, baik itu yang bersifat horizontal maupun vertikal, serta metode penyelesaian masalah yang menguntungkan kedua belah pihak apabila konflik sudah telanjur terjadi. Melalui buku ini, penulis memaparkan hal-hal tersebut secara runtut dan sistematis sehingga buku ini mudah dipahami oleh para pembaca pada umumnya, dan para pihak yang berkepentingan dalam upaya pencegahan dan resolusi konflik di Indonesia.

DITERBITKAN ATAS KERJA SAMA

IAIN
Padangsidimpuan Press

SOCIAL SCIENCES
ISBN 978-623-218-579-1